

TP

1 DEC 2003

24



PAMERAN

LAPORAN PENELITIAN  
DOSEN MUDA TAHUN ANGGARAN 2002

**FENOMENA KESALAHAN BERPIKIR DALAM WACANA SOSIAL  
POLITIK NASIONAL (Studi Atas Pernyataan-pernyataan Tokoh dan  
Pengamat Sosial-Politik di Media Massa Pasca Orde Baru)**

Oleh:

LISTOYONO SANTOSO, S.S.  
S A R K A W I, S.S., M.Hum  
PURNAWAN BASUNDORO, S.S., M.Hum.

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  
DIP Nomor : 003/XXIII/1/--/2002 Tanggal 1 Januari 2002  
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002  
Ditjen Dikti, Depdiknas  
Nomor Urut : 29

FAKULTAS SAstra  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002

FALLACIES



LAPORAN PENELITIAN  
DOSEN MUDA TAHUN ANGGARAN 2002

KKB  
KK-2B  
165  
San  
f

**FENOMENA KESALAHAN BERPIKIR DALAM WACANA SOSIAL  
POLITIK NASIONAL (Studi Atas Pernyataan-pernyataan Tokoh dan  
Pengamat Sosial-Politik di Media Massa Pasca Orde Baru)**

Oleh:

LISTOYONO SANTOSO, S.S.  
S A R K A W I, S.S., M.Hum  
PURNAWAN BASUNDORO, S.S., M.Hum.

3000139033141

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  
DIP Nomor : 003/XXIII/1/--/2002 Tanggal 1 Januari 2002  
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002  
Ditjen Dikti, Depdiknas  
Nomor Urut : 29

FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA



September, 2002

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAGA PENELITIAN

- |                                      |                                       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional       | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependidikan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional           | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit/Kesehatan Reproduksi                  |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum         | 7. Puslit Olahraga                    |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995346  
E-mail: lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

3000139033141

IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN  
DOSEN MUDA

1. a. Judul Penelitian	: Fenomena Kesalahan Berpikir Dalam Wacana Sosial Politik Nasional: Studi Atas Pernyataan-Pernyataan Tokoh dan Pengamat Sosial-Politik di Media Massa Pasca Orde Baru
b. Macam Penelitian	: I/ II / III
2. Kepala Proyek Penelitian	:
a. Nama lengkap dan Gelar	: Listiyono Santoso, S.S.
b. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
c. Pangkat/Gol/NIP	: Penata Muda/IIIa/132 262 265
d. Jabatan Sekarang	: Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Sastra
f. Univ/Inst./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	: Bahasa dan Sastra/Filsafat
3. Jumlah Tim Peneliti	: 3 (tiga) orang
4. Lokasi Penelitian	: Surabaya dan Yogyakarta
5. Kerjasama dengan Instansi lain	:
a. Nama Instansi	: -
b. Alamat	: -
6. Jangka waktu penelitian	: 6 Bulan
7. Biaya yang diperlukan	: Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Surabaya, 15 Oktober 2002

Mengetahui:  
Pembantu Dekan I Fak./Puslit. :

Drs. Sulijah, MA.  
NIP. 130 687 383

Ketua Peneliti  
  
Listiyono Santoso, S.S.  
NIP. 132 232 235

Menyetujui:  
Ketua Lembaga Penelitian Unair

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
NIP 130 701 125

## RINGKASAN

FENOMENA KESALAHAN BERPIKIR DALAM WACANA SOSIAL POLITIK NASIONAL: Studi Atas Pernyataan-Pernyataan Tokoh dan Pengamat Sosial-Politik di Media Massa Pasca Orde Baru (Listiyono Santoso, Sarkawi, Purnawan Basundoro, 2002, 65 halaman)

Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian deskriptif-kualitatif yang berusaha mengungkapkan terjadinya fenomena kesalahan berpikir (*fallacy*) dalam wacana sosial politik nasional serta berbagai bentuk pilihan *framing* oleh media massa atas suatu peristiwa yang sama.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses terjadinya kesalahan berpikir dari pernyataan para tokoh dan pengamat sosial politik yang termuat di media massa, serta analisis wacana atas makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut. Maksudnya agar masyarakat pembaca (publik) dapat secara kritis menangkap makna yang bersembunyi secara *implisit* dalam setiap pernyataan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *framing* untuk mendeskripsikan maksud dan tujuan pilihan pemuatan berita dari media massa serta analisis wacana untuk memaknai struktur pesan dalam setiap komunikasi. Analisis wacana dijadikan alat untuk memberi bobot terhadap nilai dari pernyataan yang tidak ditentukan oleh kebenaran pernyataan tersebut.

Kesalahan berpikir merupakan suatu bentuk kekeliruan seseorang dalam memperlakukan masalah sosial politik. Kesalahan itu disebabkan oleh terjadinya intelektual *cul-de-sac* yang menunjukkan kebuntuan pemikiran dan disebabkan oleh mitos, yang menganggap sesuatu yang tidak benar tetapi dipercayai sebagai kebenaran. Sebab yang pertama biasanya terjadi karena suatu bentuk pengambilan kesimpulan atas sebuah masalah sosial secara tergesa-gesa, misalnya dikarenakan oleh *fallacy of dramatic instance* atau *fallacy of restrospective determinism*, dan sebagainya.

Dengan adanya berbagai bentuk kesalahan berpikir tersebut, maka disarankan agar masyarakat cukup kritis untuk menganalisis berbagai pernyataan agar tidak mudah mengambil kesimpulan atas kebenaran pernyataan tersebut. Di lain pihak, juga harus selektif dan kritis dalam menerima setiap informasi dari media massa, apalagi terdapat bukti adanya pilihan *framing* yang berbeda atas kasus yang sama.

(LP. Jurusan Sastra Indonesia dan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Airlangga:  
No. Kontrak: 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002)

## SUMMARY

**PHENOMENON OF FALLACY IN THE STATEMENT OF NATIONAL POLITICAL SOCIAL: Study for the Statements of Prominent Figure and Political Social Watch on Mass Media in Past New Order (Listiyono Santoso, Sarkaw, Purnawan Basundoro, 2002, 65 Pages).**

This research is a kind of descriptive qualitative research that attempts to bring up the occurrence of fallacy in the statement of national social and the various selecting form of framing by mass media for the same case.

The purpose of this research is to know the process of that fallacy happens from the served statement analysis of meaning implied in the statement. That is to say in order to reader society (public) are able critically to gain the hidden meaning implicitly in every statement.

This research uses descriptive qualitative using analysis approach of framing to describe meaning and purpose of selecting for serving news from mass media and statement analysis to make a meaning of message structure in any communication. The analysis of statement made as a means making heavy for the statement value that isn't determined by the truth of statement.

Mass media is always has interest for every social problem to be made as a news. The news, then, is served according to paradigma selection of ideology as the choice. So, the must mass media has the different tendency in serving news for one or two of the same case.

The fallacy is the one's mistake to treat political social problem. This mistake is caused by performing of intellectual cul-de-sac that shows a deadlock of thinking and is caused by a mythology, that consider the untrue thing but it's convinced as a truth. The first cause is usually caused a form of making conclusion suddenly for a social problem, such as caused by fallacy of dramatic instance, post hoc ergo propter hoc, or fallacy of retrospective determinism, etc.

The present of a various form of fallacy, its suggested that society are able to analysis critically enough for truth of the statement. In other hand, society has also to accept selectively and critically such an information from mass media, more over there is a proof that present the different framing selecting for the same case.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan rahim-Nya. Tiada daya upaya kecuali datangnya dari Allah SWT, sehingga kerja serius penelitian ini dapat terselesaikan.

Penelitian ini dibiayai oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas SDM (BPPK-SDM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002, yang berusaha untuk memajukan kerja-kerja akademik para dosen muda melalui berbagai bentuk penelitian. Penelitian merupakan bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dijalankan oleh setiap civitas akademiknya. Oleh karena itu, atas bantuan biaya yang diberikan oleh BPPK-SDM Ditjen Dikti Depdiknas, peneliti sampaikan ucapan terimakasih.

Penelitian ini juga tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan terselesaikannya penelitian ini, secara khusus, peneliti sampaikan terimakasih kepada Prof. Dr. H. Med. Puruhito selaku Rektor Universitas Airlangga, kepada Prof. Dr. H. Sarmanu selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga serta kepada Prof. Wahjoedi sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Airlangga, yang telah memberikan ijin dan kesempatan bagi terselenggaranya penelitian ini. Dan kepada semua pihak yang turut serta memberikan kritik dan evaluasi atas penelitian ini, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian ini menjadi salah satu bagian dari sebuah kerja akademik yang bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 15 Oktober 2002

Ketua Peneliti



## DAFTAR ISI

	LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
	RINGKASAN DAN SUMMARY .....	iii
	KATA PENGANTAR.....	vii
	DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Rumusan Masalah.....	8
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Penelitian Sebelumnya .....	9
	B. Landasan Teori .....	11
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
	A. Tujuan Penelitian .....	20
	B. Manfaat Penelitian .....	20
<b>BAB IV</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	21
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>	
	A. Realitas Media dalam Meyajikan Berita .....	24
	B. Kecenderungan Membuat <i>Generalisasi</i> Atas Realitas: Dalam Peristiwa Konflik dan Kerusuhan di Indonesia .....	34
	C. Kesalahan Berpikir dalam Konstruksi Nalar ‘Negara’.....	48
	D. Kesalahan Berpikir dalam Politik Kekuasaan .....	55
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	64
	B. Saran-Saran .....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru dialektika sosial politik nasional kembali menunjukkan warnanya yang makin semarak. Selain terimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata, juga melalui pernyataan-pernyataan dengan muatan politis yang amat kuat, menjadi pilihan semua lapisan masyarakat untuk diperhatikan, disimpulkan dan akhirnya disikapi. Meski masing-masing *trend* (politik) ini memiliki corak dan sasarannya sendiri, tetapi pada hakikatnya ada satu mainstream yang perlu dicermati dan direnungkan. Dengan jalannya yang sangat dialektis, kita bisa menangkap bahwa semuanya membutuhkan jalan keluar yang mesti dirumuskan.

Berbagai kejadian yang melanda negeri ini; dari soal ketegangan politik antara presiden dengan lembaga legislatif sampai konflik horisontal yang berujung pada kekerasan massa; sebagaimana terjadi di Ambon, Sambas, Sampit dan juga Aceh, merupakan rentetan panjang persoalan yang membelit bangsa ini. Krisis ekonomi dan politik pasca berakhirnya kekuasaan rezim orde baru seakan teraku-mulasi menjadi krisis multidimensional yang semakin sistemik dan mendasar. Pada akhirnya, krisis ini menjadikan carut-marutnya perjalanan kehidupan sosial politik negeri ini.

Dialektika sosial-politik ini menarik untuk dicermati. Fakta empirik terjadinya krisis sosial-politik adalah realitas sosial yang objektif tidak terbantahkan. Artinya, pengetahuan manusia; yang salah satunya terbentuk dari pengalaman

inderawi, memang memberikan bukti empirik atas fenomena tersebut. Tetapi salah satu ciri khas pengetahuan manusia adalah bahwa ia tidak berhenti pada pertanyaan tentang apa, yang berujud pada fakta, melainkan harus dilanjutkan pada pertanyaan mengapa. Hal ini berarti bahwa pertanyaan mengapa diajukan untuk memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta tersebut, sebagai konsekuensi logis kelanjutan dari pertanyaan ilmiah tentang apa.

Pemahaman atas fakta inilah yang kemudian mengalami berbagai bentuk penafsiran. Pertanyaan atas *apa* (faktawi) tentang terjadinya krisis sosial politik memang terjadi kesepakatan, tetapi pertanyaan atas *mengapa* muncul fakta terjadi krisis sosial-politik dalam kenyataannya terlontar berbagai pernyataan yang dikemukakan oleh para tokoh maupun pengamatan sosial-politik yang kemudian berlomba-lomba mencari jawab atas pertanyaan mengapa tadi.

Dalam terminologi ini, maka muncullah berbagai pernyataan-pernyataan yang mencoba mencari jawab atas persoalan krisis sosial politik saat ini. Berbagai tafsiran atas persoalan tersebut sedikit banyak mulai terekam di berbagai media massa, baik televisi maupun mass media. Dari berbagai tafsiran tersebut memunculkan ragam wacana yang saling bersaing untuk memberikan penilaian atas persoalan (fakta) yang terjadi. Perbedaan pemahaman atas kasus (fakta) yang sama adalah persoalan yang mengedepan; hal ini dikarenakan penafsiran atas fakta cenderung berbeda, dan saling berebut pengaruh penggalangan opini publik. Sebagai contoh sederhana misalnya;

di dalam surat kabar kita melihat fakta (foto) adanya tanah longsor dan pohon bertumbangan. Dilatarbelakang tanah dan pohon yang

bertumbangan tadi ada gambar gunung berapi yang mengeluarkan asap tebal.

Pertanyaan bahwa apa yang berkaitan dengan fakta adanya tanah longsor dan pohon bertumbangan memang memunculkan kesepakatan. Tetapi kemudian yang terjadi adalah perbedaan pemahaman mengenai pertanyaan mengapa tanah longsor dan pohon bertumbangan ? Apakah ditimbulkan oleh gung berapi; atau oleh angin atau juga bisa oleh penebangan yang dilakukan manusia.

Contoh di atas adalah contoh sederhana untuk menggambarkan betapa penafsiran kita atas fakta di media (realitas media) bisa memunculkan perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan penafsiran atas fakta merupakan persoalan yang wajar terjadi dalam dialektika ilmu. Persoalannya adalah ketika perbedaan penafsiran atas fakta yang kemudian memunculkan pernyataan-pernyataan tersebut mengandung substansi kesalahan berpikir (*fallacy*) dalam memberikan tanggapan atas masalah sosial politik tersebut. Artinya, terjadi kesalahan pemikiran dalam memperlakukan masalah sosial politik, sehingga memunculkan pernyataan yang dianggap sebagai sebuah kesimpulan yang benar atas fakta sebagai realitas obyektif, padahal persepsi dan penafsiran orang atas fakta tidak selamanya dianggap sebagai sebuah kebenaran.

Kesalahan berpikir dalam melakukan analisis atas masalah sosial politik yang dibuat oleh tokoh maupun pengamat sosial politik merupakan persoalan mendasar yang berpengaruh pada opini publik, apalagi bila pernyataan tersebut termuat di media massa. Dapat dibayangkan betapa dalam wilayah ini masyarakat pembaca akan dihadapkan pada pilihan wacana, yang secara tidak disadari

merupakan suatu bentuk 'pembodohan'. Sebab, ada kecenderungan memberikan pembenaran atas pernyataan tokoh dan pengamat sosial politik sebagai opini publik yang mempunyai kebenaran; baik secara intelektualitas maupun moralitas.

Fenomena kesalahan berpikir ini menarik untuk dikaji dan diteliti. Apalagi bila dikaitkan dengan persoalan konstelasi sosial-politik yang berkembang belakangan ini yang mengarah pada pola komunikasi yang tidak sehat, yang menampilkan berbagai bentuk prasangka sosial (*prejudice*). Media massa menjelang Sidang Umum 1999 yang lalu, utamanya menjelang pemilihan presiden, banyak merekam berbagai prasangka sosial tetapi dipakai sebagai (alat) legitimasi untuk setuju atau tidak menyetujui seseorang untuk menjadi presiden.

Harian *Republika* (12 Maret 1999) misalnya; yang memuat pernyataan AM. Saefuddin, tokoh partai politik bersimbolkan Islam yang tidak hanya menolak presiden berjenis kelamin wanita, karena dianggap melanggar kaidah agama, bahkan sampai pada sebuah prasangka sosial bahwa jika Megawati Soekarno Putri, yang kebetulan adalah calon presiden saat itu, menjadi presiden maka akan terjadi sekularisasi negara, yang akan meminggirkan peran umat Islam dalam konstelasi perpolitikan nasional. Alasan yang dipakai adalah perilaku agama Megawati saat itu tidak jelas, apalagi termuat fakta dimana ia 'bersembahyang' di Pura pada waktu di Bali, padahal ia adalah orang Islam. Dan fakta pun kemudian menunjukkan betapa Megawati gagal menjadi presiden.

Kasus di atas, meskipun merupakan realitas politik, namun memberikan gambaran bahwa ada fenomena yang biasa dalam menggambarkan sosok Megawati berdasarkan satu dua kasus, tetapi dijadikan sebagai sebuah kesimpulan

umum. Fenomena sesat pikir ini oleh Jalaludin Rahmat (1999; 5) disebut sebagai *Fallacy of Dramatic Instance*, yaitu kecenderungan orang untuk melakukan apa yang dikenal dengan *over-generalisation*. Penggunaan satu dua kasus untuk mendukung argumena yang bersifat general atau umum.

Fenomena kesalahan berpikir (dalam ilmu logika disebut sebagai sesat pikir) jenis ini dalam kasus penolakan atas Megawati yang terekam di Harian Republika bisa diuraikan sebagai berikut :

Premis 1 : Pura adalah tempat ibadah umat Hindu  
Premis 2 : Megawati melakukan ritual di Pura  
Kesimpulan : Jadi, Megawati adalah umat Hindu

Kesimpulan ini merupakan *over generalisation*, dimana satu kasus; yaitu keberadaan Megawati di Pura yang melakukan proses ritual dianggap bahwa ia tidak jelas agamanya. Kesimpulan tersebut mempunyai substansi yang sama dengan pernyataan bahwa jika Megawati jadi presiden maka ia akan meminggirkan peran umat Islam dalam kancah politik nasional. Asumsi ini jelas diawali dari prasangka sosial yang kemudian memunculkan *stereotype* tentang sosok Megawati. Hal ini bisa diambil sebuah kesimpulan terhadap pernyataan tokoh politik bahwa :

"Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan yang sekuler dan dekat dengan komunitas agama lain, jadi kalau ia jadi Presiden maka ia akan meminggirkan umat A, karena ia sekuler dan dekat dengan agama lain".

Kerancuan berpikir semacam ini banyak terjadi dalam berbagai telaah sosial politik. Hal ini dikarenakan dalam memahami fakta tidak secara objektif, tetapi berdasarkan berbagai pertimbangan kepentingan politis, sehingga memunculkan kepastian yang sifatnya subjektif belaka. Namun, argumen yang

*overgeneralized* ini biasanya agak sulit dipatahkan. Karena, satu dua kasus rujukan itu seringkali diambil dari pengalaman pribadi seseorang atau *individual's personal experience* (Jalaluddin Rahmat, 1999; 5).

Menurut terminologi Jalaluddin Rahmat (2000; 40) kesalahan seperti ini biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu intelektual *cul-de-sac* dan mitos. Intelektual *cul-de-sac* adalah terminologi dalam bahasa Prancis yang menunjukkan suatu proses terjadinya kebuntuan pemikiran. Sementara mitos adalah sesuatu yang tidak benar, tetapi dipercayai oleh banyak orang termasuk ilmuwan, tokoh dan pengamat sebagai sebuah kebenaran. Fenomena intelektual *cul-de-sac* dan mitos ini cukup berkembang dalam pernyataan tokoh dan pengamat sosial-politik dalam melakukan tafsir terhadap masalah sosial politik yang belakangan ini tampak mengedepan.

Seiring dengan fenomena kebebasan pers telah memberikan 'angin segar' bagi masyarakat, utamanya yang berkepentingan dengan media massa, seperti elit politik, tokoh, pakar, dan sebagainya untuk melemparkan berbagai argumennya.. Kebebasan tersebut kemudian dimaknai sebagai ruang yang bebas untuk menyampaikan segenap ekspresi politiknya melalui sikap dan pernyataan. Dalam kondisi yang demikian, maka tidak dapat dihindarkan oleh, media massa (apapun) kemudian berkembang menjadi 'ruang' untuk bertarungnya berbagai pernyataan (*statement*) dan penafsirannya atas realitas sosial politik yang melingkupinya.

Persoalan apakah pernyataan tersebut benar atau tidak, bukan menjadi kajian dalam penelitian ini, karena yang diangkat adalah sekedar teks pernyataan para tokoh dan pengamat sosial politik yang terekam di media massa, dalam hal

ini Kompas pada periode awal gerakan reformasi, yang mengandung kesesatan berpikir. Penelitian inipun tidak mempersoalkan apakah media massa telah melakukan manipulasi atas pernyataan atau *distorsi* pernyataan, karena kajian ini hanya berupaya untuk menunjukkan betapa dalam analisis sosial politik nasional dalam bentuk pernyataan *an sich* fenomena sesat pikir selalu selalu mudah terjadi.

Dalam konteks ini, maka penelitian ini lebih ditekankan pada analisis wacana terhadap makna (*implisit*) dari sebuah teks, yaitu pernyataan. Analisis tersebut dikaitkan dengan salah satu model yang digunakan oleh Michel Foucault (1972; 120) tentang penekanan pada konstelasi kekuatan apa yang ada dalam proses pembentukan dan reproduksi makna, daripada bentuk gramatika maupun subjek. Bahasa yang dipergunakan tidak lagi dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar pembicara. Bahasa sebagai representasi berperan pula dalam membentuk jenis-jenis subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Apabila ini dikaitkan dengan wacana politik, bahasa tidak lagi alat atau medium 'netral', melainkan merupakan 'representasi', dalam dirinya sendiri, dari hubungan-hubungan politis (Mohammad AS. Hikam, dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, ed., 1996; 84).

Tampaknya model seperti ini oleh Michel Foucault (1972; 122) dikatakan sebagai penghampiran '*discursif-practice*' di kalangan pasca modernisme, yaitu sebuah penghampiran wacana dan bahasa yang sangat berkaitan dengan tindak dan praksis politik. *Discursif-practice* dapat dipahami sebagai proses produksi dan reproduksi wacana-wacana yang merupakan perkaitan rumit antara tanda-tanda dan praksis, yang pada gilirannya, mengatur pula eksistensi dan reproduksi



sosial. Dalam penghampiran seperti ini, bahasa dan wacana senantiasa terlibat dalam hubungan dengan kekuasaan, terutama dalam proses pembentukan subjek, dan berbagai macam tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat.

Penghampiran ini pada akhirnya lebih menekankan terhadap 'nilai' dari setiap pernyataan. Ini seperti yang dikemukakan oleh Foucault (1972; 122) bahwa

'...menganalisis suatu proses pembentukan wacana adalah memberi bobot terhadap 'nilai' dari pernyataan. Nilai tersebut bukanlah ditentukan oleh 'kebenarannya', tidak dikendalikan oleh kehadiran isinya yang rahasia. Melainkan oleh kemampuannya memberi transformasi, bukan saja dalam hal ekonomi dari wacana, tetapi juga dalam pembagian sumberdaya yang langka di dalamnya'

Melalui salah satu pendekatan ini, analisis atas teks tidak untuk melihat kebenaran atas pernyataan, melainkan untuk membongkar prasangka 'nilai' yang turut terlibat dalam pembentukan wacana.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan berpikir jenis apakah yang terjadi dalam pernyataan tokoh dan pengamat sosial politik nasional ?
2. Dimanakah letak terjadinya kesalahan berpikir dalam pernyataan tokoh dan pengamat masalah sosial politik tersebut ?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya

Tema tentang kesalahan berpikir (*fallacy*) di media massa, sepanjang pengetahuan penulis relatif jarang dijadikan bahan kajian atau objek penelitian. Penelitian tentang tema ini, dalam referensi penulis, pernah dilakukan oleh Maria Rita Ruwiasuti, yang mencoba menganalisis sesat pikir di bidang hukum agraria. Penelitian tersebut bahkan sudah dibukukan dengan judul “Sesat Pikir” Politik Hukum Agraria, Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat (2000).

Dalam penelitian tersebut, Maria Rita R., membongkar secara sistematis berbagai produk hukum bidang pertanahan yang selama ini cenderung merugikan masyarakat adat yang secara turun temurun sebagai pemilik tanah-tanah adat di Irian Jaya (sekarang Papua Barat). Hasil penelitian yang kemudian dibukukan dengan judul “Sesat Pikir” Politik Hukum Agraria tersebut bermula merupakan kajian atas berbagai sengketa agraria orang-orang Asmat di kecamatan Sawa Erma. Penguasaan tanah yang mereka buka dari hutan primer, ternyata kemudian bermasalah karena dianggap sebagai pembukaan lahan milik negara. Meskipun dalam tradisi mereka, siapapun yang membuka tanah hutan primer pertama kali merupakan pemiliknya, dan berhak atas tanah sebatas yang dibukanya. Tetapi, kemudian negara (*state*) memberlakukan politik hukum agraria dengan menyebutnya sebagai hak ulayat. Melalui kerjasama dengan pemilik HPH

misalnya, negara mulai melakukan penguasaan-penguasaan atas tanah adat tersebut.

Dalam terminologi inilah kemudian, Maria Rita Ruwastuti menyebutnya sebagai salah satu ‘sesat pikir’ (*fallacy*) dalam pemberlakuan sebuah peraturan. “Sesar pikir” yang dikedepankan dalam tulisan tersebut lebih diletakkan pada proses pemberlakuan dan pembuatan hukum agraria yang seringkali mengandung kesalahan (rasionalisasi) yang digunakannya, yang cenderung merugikan pemilik tanah adat.

Dalam penelitian ini, ‘sesat pikir’ atau ‘kesalahan berpikir’ (*fallacy*) lebih diletakkan bukan pada hukum perundangan, melainkan secara lebih luas pada berbagai pernyataan para tokoh dan pengamat sosial politik di media massa pasca Orde Baru. Pernyataan-pernyataan tersebut masih difokuskan pada media massa (harian) Kompas dengan asumsi bahwa media ini merupakan media nasional yang representatif untuk dijadikan satu-satunya sample.

Model penelitian ini, sangat jarang (untuk mengatakan tidak pernah dilakukan) diteliti. Ada beberapa kajian tematik yang sama; seperti penelitian yang dilakukan oleh Bimo Nugroho, Eriyanto dan Frans Surdiasis; tentang *Politik Media Mengemas Berita; Habibie dalam Pemberitaan Kompas, Merdeka dan Republika*, yang kemudian diterbitkan dengan judul yang sama oleh ISAI (Institut Studi Arus Indonesia). Penelitian ini tidak mengangkat problem kesalahan berpikir, melainkan lebih difokuskan pada *analisis framing* dari pemberitaan media atas fenomena Habibie ketika secara otomatais menggantikan Soeharto sebagai presiden.

Sesat pikir dalam konteks ini lebih disebut sebagai kesalahan berpikir, yaitu suatu penarikan kesimpulan –yang berwujud- pernyataan atas peristiwa yang cenderung dilakukan dengan tidak hati-hati, sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan penarikan kesimpulan. Ketidaktepatan alur logika yang digunakan untuk menyampaikan pernyataan membuat pernyataan itu mengandung kesalahan. Kesalahan berpikir itu juga bisa diwujudkan dengan berbagai pilihan *term* atau juga kata-kata yang turut memperjelas maksud implisit dari pembuat pernyataan.

Dalam ilmu logika, kesalahan berpikir juga berarti adanya ketidakkonsistensi sebuah pernyataan dengan pernyataan sebelumnya, atau teori *koherensi* dan juga ketidaktepatan antara pernyataan dengan realitas empirik atau teori *korespondensi*.

## **B. Landasan Teori**

Logika pada dasarnya merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang prinsip-prinsip yang logis dan valid. Dimana yang dipercakapkan oleh logika adalah bagaimana manusia bisa mengambil sebuah penyimpulan yang sah dan valid berdasarkan kaidah berpikir logis dan runtut. Selama menggunakan kaidah berpikir tersebut maka pernyataan yang digunakan sebagai kesimpulan bisa dianggap sebagai kesimpulan yang sah.

Menurut E. Sumaryono (1999; 9) pengetahuan tentang prinsip-prinsip logis sebuah penalaran yang sering tidak memadai. Bahkan sering terlihat orang memaksakan prinsip-prinsip tersebut untuk menarik kesimpulan yang tidak

relevan atau mempergunakan kata-kata yang memiliki makna lebih dari satu. Pemaksaan prinsip-prinsip ini pada perkembangan memunculkan fenomena sesat pikir (*fallacy*).

Sesat pikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan meyesatkan, suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya (Sumaryono, 1999:9).

Dalam terminologi yang lain, R. Soekardjo (1998;11) menyatakan bahwa kesesatan berpikir (*fallacia/fallacy*) merupakan suatu bentuk kesesatan penalaran yang mencoba mengambil kesimpulan dan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang logis, yang runtut dan sistematis. Akibatnya, muncul berbagai bentuk pernyataan yang dianggap sebagai sebuah kesimpulan atas fakta yang mengandung bias, karena tidak mengikuti alur prinsip berpikir logis tersebut. Sebagai contoh yang sederhana misalnya :

- Orang gondrong adalah penjahat
- Semua penjahat harus dipenjara
- Jadi, orang gondrong harus dipenjara

Dalam prinsip berpikir logis, jelas bahwa pengambilan kesimpulan tersebut menyalahi aturan. Sebab, terminologi orang gondrong adalah penjahat dan setiap penjahat harus dipenjara tidak serta mengandung implikasi bahwa semua orang gondrong identik sebagai penjahat. Maka disini terjadi proses kesesatan berpikir dalam mengambil kesimpulan dari kasus yang seharusnya bersifat individual dianggap menjadi gejala umum.



Contoh lain dalam wacana sosial politik belakangan ini misalnya :

- Pasca runtuhnya orde baru, krisis ekonomi semakin parah
- Gus Dur adalah penguasa pasca orde baru
- Jadi, Gus Dur penyebab krisis ekonomi yang semakin parah

Alur logika yang dipakai dalam mengambil kesimpulan diatas kelihatan masuk akal. Persoalannya adalah bahwa fakta bahwa krisis ekonomi pasca orde baru memang kesimpulan yang tidak terbantahkan. Tetapi, kesimpulan bahwa Gus Dur sebagai penguasa pasca Orde Baru dianggap menjadi penyebab krisis ekonomi semakin parah adalah bukan merupakan keputusan mutlak sebagai kesimpulan. Artinya, apakah benar Gus Dur menjadi penyebab krisis ekonomi ini, masih membutuhkan penelitian yang intensif.

Contoh-contoh tersebut merupakan salah satu bentuk adanya kesesatan berpikir yang seringkali manghinggapi wacana sosial politik nasional belakangan ini. Meskipun harus diakui menurut R. Soekadijo (1985;11) bahwa tidak pernah ada kejelasan mengenai tipe-tipe kesesatan. Tidak ada klasifikasi kesesatan yang memadai yang bisa diterima secara umum. Dan kiranya sulit diharapkan akan adanya klasifikasi kesesatan yang memadai itu. Cara bagaimana penalaran manusia dapat tersesat, tiada batasnya. Aristoteles, sebagai bapak logika, hanya menyebutkan tiga belas tipe, sedang ahli-ahli logika modern dewasa ini mengenal lebih dari seratus tipe.

Dalam pemahaman Soekadijo selanjutnya (1985;11) kesesatan penalaran itu dapat terjadi karena yang sesat itu, karena sesuatu hal, kelihatan masuk akal. Kalau orang mengemukakan sebuah penalaran yang sesat dan ia sendiri tidak

melihat kesesatannya, penalaran itu disebut paralogisme. Kalau penalaran yang sesat itu dengan sengaja digunakan untuk menyesatkan orang lain maka disebut sofisme.

Di bagian lain E. Sumaryono (1999; 11) menyatakan bahwa term “kepalsuan” sebagai sebuah kesesatan berpikir pada dasarnya dapat dipergunakan dalam berbagai kemungkinan. Yang lazim, term tersebut dipergunakan untuk menggambarkan gagasan yang keliru yang salah. Dalam logika term tersebut dipergunakan dalam arti yang lebih sempit, yaitu palsu berarti keliru dalam menalar atau dalam berargumen.

Pada dasarnya motivasi pokok seseorang menyusun sebuah argumen adalah membuktikan bahwa kesimpulan yang ia peroleh dalam menalar adalah benar. Sebuah argumen ada kemungkinan gagal dalam memenuhi tujuan tersebut. Menurut The Liang Gie (1979;35) ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab kegagalan argumen.

1. Kegagalan dapat terjadi karena suatu argumen memuat premis yang terbentuk dari proposisi yang keliru. Jika sebuah argumen memuat premis yang keliru, maka argumen tersebut akan gagal dalam menetapkan kebenaran kesimpulan.

Contoh :

Premis 1 : ABRI harus menjalankan dwifungsi sipil-militer  
 Premis 2 : Tentara bayaran tidak memperhatikan fungsi sipil  
 Kesimpulan : Jadi, ABRI tanpa dwifungsi akan sama dengan tentara bayaran

2. Kegagalan dapat terjadi karena suatu argumen ternyata memuat premis-premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari. Disini logika

berperanan penting. Sebuah argumen yang premis-premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulannya merupakan argumen yang 'sesat' sekalipun semua premisnya mungkin benar.

Contoh :

Premis 1 : Sifat Tuhan adalah kekal abadi

Premis 2 : Pancasila memuat nilai-nilai yang kekal dan abadi

Kesimpulan : Jadi, Tuhan dan Pancasila adalah identik

Sebagaimana diungkapkan diatas , ada banyak jenis kekeliruan yang dilakukan orang dalam melaksanakan penalaran atau dalam berargumen. Setiap kekeliruan dalam menalar itu merupakan argumen yang salah. E. Sumaryono (1999;10) mengungkapkan ada dua (2) macam argumen yang salah;

*Pertama*, argumen yang sebenarnya keliru namun tetap diterima umum karena banyak orang yang menerima argumen tersebut tidak merasa kalau mereka itu sebenarnya telah tertipu. Kesesatan berpikir ini disebut relevansi. Argumen-argumen yang semacam ini biasanya bersifat persuasif dan dimaksudkan untuk mempengaruhi aspek kejiwaan orang lain. Biasanya terdapat dalam pidato politik dalam kampanye, pernyataan pejabat untuk meredam situasi, reklame untuk menawarkan barang-barang produksi, dan sebagainya.

*Kedua*, argumen yang keliru karena kesalahan dalam penalaran yang disebabkan oleh kecerobohan dan kurangperhatian orang terhadap pokok persoalan yang terkait, atau keliru dalam menggunakan term dan proposisi yang memiliki ambiguitas makna dari bahasa yang dipergunakan dalam berargumen. Sesat pikir semacam ini disebut penalaran yang ambigu atau ambiguitas penalaran. Misalnya, term salah prosedur yang sering diucapkan pejabat untuk



berdalih bila mendapatkan kritik dari masyarakat. Term ini memiliki arti lebih dari satu, yaitu dapat diartikan sebagai salah interpretasi terhadap salah perintah/instruksi, mempergunakan metode atau langkah yang berbeda dan tidak dimaksudkan dalam petunjuk pelaksanaan sebuah proses kegiatan, atau pengambilan putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sebagainya.

Kedua ragam kesesatan berpikir inilah yang dijadikan pijakan dasar dalam menganalisis terjadinya proses kesesatan berpikir yang dilakukan oleh tokoh dan pengamat sosial politik terhadap berbagai peristiwa sosial politik yang termuat di media massa. Kedua jenis kesesatan ini tersebut adalah kesesatan relevansi dan kesesatan karena bahasa atau ambiguitas penalaran. Meskipun demikian titik tolak pemahaman atas kedua jenis kesesatan tersebut pada dasarnya masih memerlukan rincian, karena keduanya dalam kenyataannya masih terdiri dari berbagai bentuk jenis kesesatan.

Misalnya dalam uraian E. Sumaryono (1999;11-17) dan Soekadijo (1988;11-13) kesesatan relevansi terdiri dari berbagai jenis kesesatan, seperti *argumen ad baculum*, *argumen ad hominem*, *argumen ad ignorantiam*, *argumen ad misericordiam*, *argumen ad populum*, *accident*, dan sebagainya. Sementara kesesatan karena bahasa atau ambiguitas penalaran terdiri dari misalnya; term ekuivokasi, term amphiboly, accent, komposisi dan sebagainya. Penggunaan istilah-istilah kesalahan berpikir tersebut tidak akan dipakai secara keseluruhan dalam menganalisis pernyataan-pernyataan yang dianggap mengandung

kesalahan, tetapi hanya akan ditentukan secara acak, tergantung temuan dalam media massa yang bersangkutan.

Sementara itu di bagian lain Jalaludin Rahmat (1994;4-33) tidak berupaya melakukan pembagian atas kesesatan menjadi dua jenis di atas. Melainkan menguraikan secara global fenomena kesesatan berpikir tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu : *pertama* adanya *intelecctual cul-de-sac* yang diterjemahkan sebagai kebuntuan pemikiran, yang terdiri dari 7 jenis kesesatan seperti misalnya: 1) *fallacy of misplaced concretness* yaitu adanya kecenderungan untuk melakukan apa yang dikenal dengan *over-generalisation*. Yaitu penggunaan satu dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum. 2) *Fallacy of Retrospective Determinism*, yaitu anggapan bahwa masalah sosial yang sekarang terjadi sebagai sesuatu yang secara historis memang selalu ada, tidab bisa dihindari, dan merupakan akibat dari sejarahyang cukup panjang, serta 3) *Post Hoc Ergo Propter Hoc*, yang berasal dari bahasa latin: *post* artinya sesudah, *hoc* artinya demikian; *ergo* artinya karena itu; *propter* artinya disebabkan; dan *hoc* artinya demikian. Singkatnya: sesudah itu - karena itu - oleh sebab itu. Jadi apabila ada peristiwa yang terjadi dalam urutan temporal, maka kita menyatakan bahwa yang pertama adalah sebab dari yang kedua, padahal kenyataan tidak selamanya seperti itu, dan sebagainya. Yang *kedua* dikarenakan mitos yang diartikan sebagai sesuatu yang tidak benar tetapi dipercayai oleh banyak orang. Mitos ini biasanya seringkali dimunculkan melalui *stereotype* atas munculnya berbagai kejadian atau sebab.

Selain berbagai bentuk kesalahan berpikir di atas, penelitian ini juga akan sedikit menguraikan bentuk pilihan *framing* dari media massa dalam menurunkan berita. Pilihan *framing* itu ditampilkan untuk memberikan suatu penjelasan bahwa media massa juga dapat menjadi sebab yang melatarbelakangi terjadinya kesalahan berpikir, karena (misalnya) memberikan berita yang manipulatif atau istilahnya terjadi bias media. Bias media ini biasanya terjadi dalam tiga hal, *Symulacrum*, Distorsi dan Reduksi. *Symulacrum* berarti model realitas yang dikonstruksikan oleh media massa meski sesungguhnya adalah palsu, *distorsi* lebih diartikan sebagai bentuk pemanipulasian berita sehingga tidak sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi dan *reduksi* lebih bermakna sebagai bentuk penyajian berita yang hanya melihat pada satu bagian dari suatu data dan fakta yang sangat kompleks (Al Zastrow, dalam Heri Winarko, 2000; vi-ix).

Bias berita terjadi karena media massa tidak berada di ruang vakum. Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik dan fakta yang sangat kompleks dan beragam. Louis Althusser sebagaimana dikutip oleh Al Zastrow (Heri Winarko, 2000; ix-x) menulis bahwa media, dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi strategis, terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi. Media massa sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni, dan kebudayaan, merupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (*ideological states apparatus*).

Pandangan lain tentang persoalan ini dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Menurut Gramsci sebagaimana dikutip Alex Sobur (2001; 30) justru merupakan arena pergulatan antarideologi yang berkompetisi (*the battle ground for competing ideologies*). Baginya, media merupakan ruang di mana berbagai ideologi direpresentasikan. Hal ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik, namun di sisi lain, media juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan, sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

Persoalan ini yang terjadi dalam realitas media masa kita. Pergulatan berbagai kepentingan dalam media massa tersebut menjadi salah satu kenyataan betapa media massa kita tidak pernah bebas, independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial (Alex Sobur, 2001; 30). Pada konteks ini maka berbagai bentuk kesalahan berpikir menjadi mudah bermunculan oleh media massa sekaligus juga dalam pernyataan para tokoh dan pengamat sosial politik di Indonesia dalam memahami realitas sosial yang terjadi.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **A. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui proses terjadinya kesesatan berpikir dari pernyataan para tokoh dan pengamat sosial politik yang termuat di media massa.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis kesesatan berpikir dari pernyataan dan tokoh sosial politik yang termuat di media massa.

##### **B. MANFAAT PENELITIAN**

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan berbagai bentuk kesesatan berpikir dari tokoh dan pengamat sosial politik, sehingga masyarakat pembaca bisa secara obyektif melakukan penilaian atas pernyataan tersebut.
2. Hasil penelitian ini akan menjadi *counter* wacana (wacana tanding) dari hegemoni ide atas fakta yang selalu dimonopoli tokoh dan pengamat sosial politik, sehingga masyarakat tidak serta merta mengambil kesimpulan atas pernyataan tentang fakta yang termuat di media massa.
3. Bagi pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan Nasional, hasil penelitian ini dapat disebarluaskan bagi kalangan pendidikan dengan harapan dapat memperkaya khasanah pemikiran di masyarakat.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis wacana. Meskipun merupakan penelitian atas sebuah pernyataan (kalimat), tetapi penelitian ini tidak kemudian merupakan penelitian jenis sastra yaitu seperti penggunaan kata-kata atau kalimat dalam struktur yang logik, untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hubungan satu sama lain (Danandjaja, 1990;98). Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan makna dari pernyataan (kalimat) serta berupaya untuk mengungkap jenis-jenis kesalahan berpikir dalam pernyataan-pernyataan para tokoh dan pengamat sosial politik yang menyimpang dari prinsip berpikir logis. Pengungkapan pernyataan tersebut dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu data terurai dalam bentuk kata-kata atau kalimat dan semua hal yang berupa sistem tanda, apa adanya, yang kemudian dilakukan analisa tentang fenomena sesat pikir atas pernyataan tersebut.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

#### **1. Penentuan Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah surat kabar (yang tidak ditentukan nama dan jenisnya) yang memuat pernyataan-pernyataan tokoh dan pengamat sosial politik, utamanya dalam bentuk artikel/opini, Pasca Runtuhnya Rezim Socharto, yang dikhususkan pada pelanggaran prosedur berpikir logis dalam ilmu logika.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data diambil dari sumber data yang sesuai dengan perumusan masalah, dimana peneliti menggunakan teknik simak catat, yaitu melakukan penyimak dan pencatatan untuk mendapatkan data-data sesuai dengan kebutuhan.

## **3. Analisa Data**

Sesuai dengan masalah, analisa data penelitian ini merupakan kajian atas pernyataan sebagai proses pengambilan kesimpulan atau keputusan yang mengandung kesesatan berpikir. Kajian atas pernyataan yang mengandung sesat pikir tersebut menggunakan pijakan pemikiran para ahli ilmu logika yang merumuskan proses-proses dan bentuk-bentuk terjadinya kesesatan berpikir, dalam penelitian ini yang dipakai adalah pemikiran Jalaludin Rahmat dalam bukunya *Rekayasa Sosial* (1999;5-34).

Secara khusus, berbagai pernyataan yang termuat di media massa tersebut; untuk menemukan letak kesesatan berpikirnya dilakukan pendekatan interpretasi dan pemaknaan atas teks. Melalui metode analisis wacana maka setiap pernyataan akan ditelusuri nilai yang terkandung didalamnya.

Analisis wacana digunakan untuk memaknai struktur pesan dalam komunikasi. Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat, fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks

dan *inheren* yang disebut wacana (Stephen P. Littlejohn, 1992; 85). Analisis wacana yang digunakan lebih didekati dengan menggunakan interpretasi murni sebagaimana penelitian kefilsafatan.

Dalam metode penelitian filsafat, analisis wacana dapat juga diletakkan melalui penggunaan metode holistika, yaitu subjek yang menjadi objek studi, tidak hanya dilihat secara 'atomistis', yang terisolasi dari lingkungannya, melainkan ditinjau dalam interaksi dengan seluruh kenyataan.

#### 4. Menyimpulkan dan Menyusun Hasil Laporan Penelitian

Setelah melalui analisis data dari berbagai pernyataan tersebut, kemudian disusun suatu kesimpulan dan laporan hasil penelitian sesuai dengan formal yang telah ditentukan.





## BAB V

### HASIL PEMBAHASAN

#### A. Realitas Media dalam Meyajikan Berita

Fenomena kesalahan berpikir atau ‘sesat pikir’ (*fallacy*) merupakan suatu keadaan yang mudah muncul, disadari maupun tidak disadari. Titik tolak untuk memahami fakta atau realitas yang berbeda –bisa jadi- menjadi penyebab lahirnya berbagai pernyataan yang mengandung kesalahan. Alur logika yang dikembangkan biasanya sesuai dengan asumsi pembuat pernyataan (tokoh dan pengamat) atas fakta yang diamati. Latarbelakang sosial politik dan lebih-lebih ideologi turut serta memperkuat lahirnya berbagai pernyataan yang menurut asas logika berpikir sebagai kesalahan berpikir.

Belakangan, seiring dengan diberikannya kebebasan berpendapat dan media massa memberikan ‘ruang’ untuk itu, fenomena tersebut menjadi mudah untuk ditemukan. Apalagi bila media massa (pers) kemudian dimanfaatkan oleh kalangan politisi untuk pencapaian tujuan-tujuan ideologi-politiknya, maka ia adalah katalisator paling efektif untuk mereproduksi pernyataan-pernyataan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka yang berkepentingan. Tidak berlebihan bila William J. Small (1972; 124) mengatakan bahwa bagi para politisi, pers tentu sangat menggairahkan. Melalui pers, politisi, mungkin juga pengamat sosial politik, membentuk imaji massa tentang dirinya. Reproduksi pernyataan di media massa adalah bagian dari kepentingan politiknya.

Realitas ini kemudian ditangkap oleh pers untuk membantu menghubungkan keinginan politik politisi agar dapat ditangkap oleh massanya.

Reproduksi pernyataan tersebut menemukan momentumnya seiring dengan runtuhnya Soeharto (1997), dimana pers Indonesia yang memang tampak mengalami liberalisasi yang cukup signifikan, telah memberikan porsi memadai bagi penyaluran hasrat politisi untuk membuat pernyataan sebanyak-banyaknya.

Dalam terminologi ini, tidak berlebihan bila selama era awal reformasi, pers di Indonesia menjadi media efektif bagi para politisi juga pengamat untuk mereproduksi pernyataan atas realitas sosial politik yang terjadi. Satu peristiwa kemudian menjadi mudah ditafsirkan dengan bermacam-macam. Semacam terminologi 'puisi', sebuah kata dapat menjadi beragam maknanya, tergantung yang memberikan apresiasi atas kata tersebut, apalagi situasi situasi perpolitikan nasional. Lihat saja betapa persoalan tentang konstitusional atau tidak, naiknya Habibie menjadi presiden telah memunculkan berbagai situasi paradoks tentang landasan perundangan di tanah air.

Diperlonggarnya ijin Surat Ijin Usaha Pers dan Penerbitan (SIUPP) kemudian turut pula memberikan iklim kondusif bagi lahirnya sejumlah pernyataan atas realitas sosial melalui terbitnya berbagai media massa. Sebut misalnya, Amanat, Duta Masyarakat Baru, Demokrat, dan sebagainya. Analisis *framing* atas sebuah kasus pun kemudian menjadi bermacam-macam tampilannya, tergantung atas ideologi yang menjadi anutan pers tersebut. Bahkan pers lama pun turut serta terlibat dalam pertarungan antar media, dalam memandang atau 'membaca' sebuah peristiwa politik. Penggunaan analisis *framing* adalah pilihan yang tampak mengedepan dari masing-masing media untuk menurunkan beritanya.

0

Dalam konteks analisis framing ini, Robert M. Etman, sebagaimana dikutip oleh Bimo Nugroho, dkk (1999; 21) melihat *framing* dalam dua dimensi besar; seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas/isu tersebut. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau mudah diingat oleh khalayak. Dalam prakteknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan strategi wacana, misalnya: melalui penempatan yang mencolok (*headline*, depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk memperkuat dan mendukung penonjolan.

Penekanan pada pilihan *framing* ini menjadikan tema-tema tertentu telah melibatkan pilihan ideologi-politik tertentu yang seolah seringkali dibenturkan atau dikontraskan. Media yang satu dengan media yang lain akan memberikan penekanan yang berbeda atas sebuah realitas sosial-politik. Media massa kemudian menjadi arena perang simbolik antar berbagai pihak yang berkepentingan atas pengungkapan fakta-fakta sosial politik yang terjadi. Charlotte Ryan (Agus Sudibyo, 1998; 26) mengatakan; "Pertarungan lewat *framing* menentukan peristiwa mana yang ditekankan. Media menjadi arena kritis dari pertarungan, dan gerakan sosial, menempatkan media pada peran menentukan arti penting isu di hadapan khalayak. Tetapi peningkatan perhatian itu sendiri bukanlah gerakan sosial tetapi lebih pada penafsiran, yang menampilkan pandangan atas realitas agar didukung oleh banyak orang".

Pada kondisi yang demikian maka media massa akan senantiasa membuat konstruk atas realitas berita sesuai dengan keinginan para jurnalisnya, minimal oleh kekuatan paradigma ideologisnya yang membentuknya. Media massa kemudian sangat berkepentingan menjadi instrumen untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat. Sesuatu yang sebenarnya tidak berarti, dapat menjadi berarti melalui penciptaan berbagai cerita dan data-data yang disajikan oleh media massa, sekalipun data tersebut merupakan rekaan-rekaan imajiner dari sang penulis berita atau sumber berita. Hal seperti ini sering terjadi di tengah masyarakat yang masih kuat dihinggapai budaya isu dan intrik, di mana berita dianggap sebagai kenyataan dan kebenaran tanpa *reserve*. Melalui penciptaan realitas imajiner yang dibingkai dengan kata-kata dan berbagai macam argumentasi (baik yang ilmiah, teoritik maupun fiksi) sesuatu yang sebenarnya hanya fantasi dan imajiner menjadi fakta yang bisa mengarahkan kesadaran masyarakat (Al Zastrow, dalam Heri Winarko, 2000; vi).

Menurut Yasraf Amir Pilliang (Kompas, 2 Oktober 2000) upaya penciptaan realitas imajiner dalam sajian media massa (baik dalam bentuk berita, laporan maupun esai) sering disebut dengan istilah *symulacrum*, yakni 'model realitas' yang tampak nyata, tetapi sebenarnya palsu. Realitas disembunyikan di balik citra realitas (*image of reality*) sedemikian rupa, sehingga antara 'realitas' dan 'citra realitas', antara 'model' dan 'kenyataan' tidak dapat dibedakan lagi.

*Symulacrum* menurut Al Zastrow (Heri Winarko, 2000; vii) merupakan salah satu bentuk bias media massa, yang cenderung dapat 'menyesatkan' kesadaran masyarakat. Bentuk lain dari bias media *distorsi*, yang meliputi

pendistorsian berita, baik pada dataran penafsiran, analisa maupun komentar sehingga berita yang berkembang justru meluas dan kadang bertentangan dengan berita pokok. Berikut ini diberikan berbagai contoh paling nyata dari pola bias *distorsi* ini tampak ketika misalnya, harian Republika (18 Desember 1998) – sebagaimana hasil penelitian Bimo Nugroho, dkk. (1993)- menurunkan berita tentang demonstrasi mahasiswa menentang Habibie dengan judul ‘Mahasiswa mulai Menggunakan Senjata’. Pilihan *framing* ini jelas berkeinginan untuk membentuk kesadaran masyarakat bahwa gerakan mahasiswa sudah mulai anarkhis dan berbahaya.

Penggunaan kata *mulai menggunakan senjata* mensugestikan bahwa gerakan mahasiswa sudah mulai keluar dari gerakan moral. Kata *mulai* –menurut Bimo Nugroho, dkk, (1999; 183)- ditekankan untuk mengkomunikasikan bahwa peristiwa ini adalah perkembangan baru. Jika sebelumnya mahasiswa sering menggunakan batu sebagai cara bertahan atau perlawanan atas aparat keamanan yang memakai senjata dan gas air mata, kini senjata itu bukan lagi dimaksudkan sebagai cara bertahan tetapi bagian dari cara demonstrasi. Sedangkan kata *menggunakan* itu sendiri mengacu kepada pengertian kesengajaan, terencana dan bagian dari strategi demonstrasi mahasiswa. Pilihan judul yang demikian oleh Harian Republika diperkuat dengan suatu penekanan tentang cara baru demonstrasi mahasiswa menggunakan senjata.

‘Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forkot, FKSMJ, Famred, dan Gema ITB, kembali berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, kemarin. Kali ini mereka tidak sekedar menggelar spanduk, meneriakkan yel-yel atau memaki aparat keamanan, tapi juga mengacungkan bambu runcing dan pentungan. Korban berjatuhan’

Apa yang ditulis oleh Republika sangat kontras dengan berita yang diturunkan oleh Kompas (18 Desember 1998) yang justru memandang bahwa aparat keamanan bertindak keras dalam mengamankan demonstrasi dengan pilihan judul "Insiden Berdarah Kembali Terulang". Dalam tulisan tersebut, Kompas jelas berkeinginan menunjukkan fakta betapa aparat keamanan bertindak *represif* dalam menangani demonstrasi mahasiswa. Tindakan tersebut kemudian berujung pada jatuhnya korban di pihak mahasiswa.

Vera (mahasiswi angkatan 95, Fakultas Hukum UKI) tenguknya trauma berat. Ia adalah satu dari 21 mahasiswa korban tindakan aparat keamanan, yang mencegat bus mahasiswa. Anggota-anggota ABRI menembaki bus yang sedang mengangkut mahasiswa dari Senayan ke arah UKI persis di daerah Cawang Atas.

Setelah ban-ban bus kempes ditembaki, mahasiswa berhamburan keluar. Begitu keluar pintu bus, Vera dihajar dan diinjak, sehingga tenguknya trauma berat. Tim dokter menyatakan, harus dilakukan pembedahan untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara 20 mahasiswa lainnya masih harus dirawat di Unit Gawat Darurat RS UKI'

Berdasar pada kedua fenomena pilihan *framing* tersebut di atas, maka secara implisit dapat dimengerti betapa media massa mudah sekali menampilkan sebuah analisis yang berbeda atas kasus yang sama. Perbedaan tampilan isi berita secara mendasar tersebut mempunyai implikasi bahwa di antara media massa telah terjadi sebuah distorsi berita (salah satunya atau mungkin juga semuanya). *Distorsi* berita ini seringkali membuat bingung masyarakat untuk menarik kesimpulan atas fakta yang sedang terjadi. Apalagi bila masyarakat (publik) hanya mengetahui peristiwa tersebut dari pemberitaan di media massa, maka mereka akan beranggapan bahwa apa yang dikonstruksikan oleh media merupakan kenyataan, meski itu hanya sekedar realitas media atau 'citra atas kenyataan'.

Pilihan *framing* yang berbeda inilah yang sering membuat kaburnya pemahaman masyarakat atas peristiwa. Pada tingkatan ini maka kesalahan berpikir dari masyarakat atau juga tokoh dan pengamat sosial politik dalam ‘membaca’ realitas menjadi mudah muncul.

Bias media massa yang ketiga adalah *reduktif*, yaitu mengambil satu bagian saja dari suatu data dan fakta yang sangat kompleks untuk dijadikan berita. Pola seperti ini dikenal dengan istilah *focusing*, yaitu menulis suatu berita dengan hanya memfokuskan pada suatu titik sasaran dengan mengabaikan faktor-faktor yang ada di sekitarnya.

Sedikit keluar dari konteks kesalahan berpikir, contoh yang sangat menonjol dari penggunaan perbedaan pilihan *framing* dari media massa ketika mempersoalkan pengangkatan Habibie menjadi Presiden pada tanggal 22 Mei 1997. Persoalan ini merupakan bahan kajian utama dari penelitian Bimo Nugroho, Eriyanto dan Franz Sudiarsis dari Institut Studi Arus Indonesia (ISAI) Jakarta. Harian *Republika* misalnya menurunkan berita mengenai pengunduran diri Soeharto dan pengangkatan Habibiem dengan judul ‘Soal Pengunduran Diri HM Soeharto, Pakar Tata Negara: Sah dan Konstitusional’. Sementara Harian *Kompas*, menurunkan berita dengan judul; ‘Pengangkatan Habibie Pro-Kontra, sedangkan harian *Merdeka* lebih provokatif dengan membuat judul; ‘Pengangkatan Habibie Adalah Masalah Politik’. Bahkan harian *Merdeka* juga menurunkan berita dengan judul lebih keras lagi; “Soeharto Ambil Putusan Sepihak”.

Ketiga media massa tersebut jelas berkepentingan untuk mengedepankan pilihan politiknya masing-masing. *Republika* sebagai media yang diterbitkan oleh

ICMI jelas berkepentingan untuk terhadap Habibie sebagai *patron* politik mereka, sehingga menampilkan *headline* yang cenderung membelanya (Habibie) melalui penguatan beberapa pakar hukum tatanegara secara nominal (3 orang) seperti Yusril Ihza Mahendra, Sri Soemantri dan Satya Arinanto. Harian Kompas, yang sedikit lebih netral justru menampilkan berita yang tidak memihak, sedangkan Merdeka, media yang selama ini dianggap dekat dengan Megawati memberikan penekanan yang sangat berbeda dengan Republika, karena justru menganggap bahwa pengunduran diri Soeharto tidak sah secara konstitusional, dengan demikian naiknya Habibie juga tidak konstitusional.

Dalam persoalan lain, misalnya tentang aksi massa (mahasiswa) yang menuntut Habibie mundur dari kursi kepresidenan yaitu tanggal 4 dan 5 Oktober 1998, ternyata menghasilkan pilihan penekanan yang berbeda antar ketiga media massa tersebut. Aksi massa yang terjadi pada awal Oktober 1998 tersebut banyak didukung oleh tokoh-tokoh nasional, salah satunya adalah Barisan Nasional yang dipimpin Kemal Idris. *Frame* Republika dengan judul provokatif: "Pernyataan Barisan Nasional Mengarah Makar". Republika yang sejak semula berkeyakinan bahwa Habibie adalah presiden yang konstitusional, maka aksi massa yang menuntut ia mundur adalah gerakan yang tidak konstitusional. Pernyataan dukungan dari Barnas –dengan sendirinya- dianggap dapat menggerakkan massa untuk menurunkan Habibie sebagai presiden konstitusional, dan merupakan gerakan makar, karena berupaya mengganti pemerintahan yang sah. Hal ini bisa dilihat dari berita yang dimuat di Republika, 4 Oktober 1998:



“Pernyataan Barisan Nasional untuk mendukung gerakan massa menggulingkan Presiden Habibie memancing reaksi berbagai kalangan. Tokoh reformasi Dr. Amien Rais menilai niat kelompok Gerakan Reformasi se-Jawa yang didukung Barisan Nasional tidak bisa dibenarkan.” Menurut saya itu kelewatan” ujar Ketua Umum PAN menjawab pertanyaan wartawan kemarin”.

Dalam kasus yang sama, Kompas menampilkan berita yang cukup hati-hati untuk menilai peristiwa ini. *Frame* Kompas: *Banyak Pihak Tidak Setuju Pernyataan Barisan Nasional*. Tampak jelas, jika harian ini mencoba membiarkan perbedaan pendapat dan membeberkan apa adanya kepada khalayak. Bahkan dalam berita yang lain, dengan nada santun, Kompas (5 Oktober 1998) menurunkan *frame*: “Amien Rais tak Setuju Ancaman Barisan Nasional”. Hal ini nampak dengan tulisan sebagai berikut :

‘.....Ketua Umum DPP PAN Amien Rais menyatakan tidak setuju cara-cara inkonstitusional, seperti gerakan massa yang didukung Barisan nasional, untuk menggulingkan pemerintah yang sah.....’

Harian Merdeka, yang memang sejak awal berbeda dengan Republika dalam memahami naiknya Habibie jadi presiden, justru mengangkat *frame*: *Yang Dilakukan Barisan Nasional Hanya Perbedaan Pendapat*. Dalam *frame* Merdeka, posisi Habibie sebagai presiden itu sendiri memang sah secara konstitusional. Tetapi, dalam perjalanannya, keberadaan Habibie itu sendiri banyak dipertanyakan legitimasinya. Adanya demonstrasi atau orang menginginkan Habibie turun dianggap wajar sebagai dinamika demokratisasi oleh harian ini. Harian Merdeka tidak lantas menyebut mereka ini sebagai makar atau tidak konstitusional. Kritik adalah bagian yang wajar karena Habibie memperoleh kursi kepresidenan –meski konstitusional- tetap kontroversial. *Frame* inilah yang

dipakai untuk menilai pernyataan dukungan Barnas untuk menjatuhkan Habibie (Bimo Nugroho, dkk, 1999; 136).

Dalam mengangkat pilihan *framing* tersebut oleh Harian Merdeka diturunkan judul “Menentang Habibie, Jangan Diartikan Makar” (5 Oktober 1998). Secara implisit, judul ini berarti bahwa semua gerakan yang menginginkan Habibie mundur tidak bisa disamakan dengan tuduhan makar.

“Menentang kebijakan Presiden BJ Habibie jangan lalu diartikan makar, kecuali kalau yang ditentang itu ideologi negara, dasar negara atau bentuk negara. Jadi jangan menganggap perbedaan pendapat itu makar. Demikiran penegasan salah seorang tokoh Barnas Letjen (Purn) Bambang Triantoro kepada Merdeka di Jakarta, tadi malam.

Pilihan pada analisis *framing* yang mudah muncul pada era kebebasan pers ini adalah cerminan dari begitu longgarkan media massa menafsirkan berbagai peristiwa sosial-politik untuk dikonsumsi media. Akibatnya, yang muncul adalah realitas media menjadi kenyataan, sementara realitas sosial yang dikonstruksi media terabaikan. Situasi ini, pada gilirannya cukup membuat bingung masyarakat, karena mereka diharuskan membuat sebuah pilihan-pilihan berita yang berbeda secara mendasar.

Keadaan yang demikian mengakibatkan semakin mudahnya media menampilkan pernyataan-pernyataan –yang meski- diduga mengandung kesalahan berpikir (dalam alur berpikir logis) dari tokoh dan pengamat sosial politik di Indonesia. Artinya, selama pernyataan tersebut, menarik untuk dikonsumsi – sesuai dengan kepentingan ideologi (politik) maupun pasar (pembaca), maka menjadi layak untuk ditampilkan di media massa. Karenanya, menjadi wajar bila pada era awal reformasi, banyak media massa memberikan analisis yang berbeda

atas sebuah peristiwa, juga dengan menampilkan tokoh atau pengamat yang berbeda pula. Pada titik inilah kemudian mudah sekali terjadi sebuah kesalahan berpikir, karena setiap pernyataan, seringkali diiringi dengan kepentingan ideologi politik, emosionalitas dan kepentingan lainnya.

Pembahasan ini penting dikedepankan dalam penelitian ini untuk memberikan suatu pemahaman bahwa kesalahan berpikir untuk menarik suatu kesimpulan juga terjadi dalam media massa. Berbagai pernyataan yang hendak dijadikan fokus kajian penelitian ini, terlepas apakah media massa melakukan distorsi atau tidak, hanyalah untuk memberikan suatu argumen bahwa pola berpikir sebagaimana yang termuat dalam media massa tersebut dapat mengandung kesalahan dalam aturan hukum logika berpikir secara benar.

#### **B. Kecenderungan Membuat *Generalisasi* Atas Realitas: Dalam Peristiwa Konflik dan Kerusuhan di Indonesia**

Setelah di awal bab ini dimunculkan berbagai bentuk perbedaan *framing* dari berbagai media massa dalam memahami sebuah peristiwa, maka dalam pembahasan ini, akan ditekankan pada bagaimana para tokoh dan pengamat sosial dan politik justru menjadi *subjek* yang seringkali mengalami kesalahan berpikir dalam membuat pernyataan. Kalau di awal bab ini lebih ditekankan pada aspek *frame* media massa menurunkan berita, maka dalam pembahasan selanjutnya ini justru difokuskan pada tokoh dan pengamat yang memberikan analisis atas peristiwa.

Fenomena kesalahan berpikir yang muncul dalam pernyataan para tokoh dan pengamat sosial politik di media massa, biasanya lebih bersifat *generalisasi*

atau menjadikan sebuah kasus atau peristiwa dianggap sebagai *representasi* dari peristiwa pada umumnya. Padahal satu dua kasus belum cukup representatif untuk membuat sebuah kesimpulan yang sifatnya umum. Satu dua peristiwa hanya cukup untuk memberikan kesimpulan atas peristiwa yang sifatnya temporal atau tertentu, tetapi tidak bisa ia diturunkan untuk memberikan pembenaran atas kasus lain yang sifatnya lebih *general* atau umum.

Pernyataan dan analisis yang belakangan seringkali muncul adalah ketika banyak pengamat memahami fenomena kerusuhan antar etnis yang terjadi di kota Sampit antara Madura dengan Dayak. Terdapat fakta bahwa pembunuhan dan pembersihan atas etnis (*genocida*) merupakan fakta sosial yang objektif, tetapi pemahaman atas fakta tersebut ternyata seringkali memunculkan pernyataan yang justru cenderung *stereotype*, bahkan melegitimasi munculnya kekerasan.

Sebagai contoh adalah pernyataan atau tulisan Gimong Awan seorang budayawan dari suku Dayak (Kompas, 4 Maret 2001) bahwa ;

".....Sesungguhnya Suku Dayak sangat mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan maupun teknologi. Di perkotaan misalnya, Suku Dayak masih membawa sifat toleransi tinggi dan memilih banyak mengalah. Sebagai contoh, ketika kaum pendatang memasuki kota Palangkaraya dan menguasai perdagangan. Suku Dayak cenderung menggeser ketepian kota.....Tidak hanya itu, Suku Dayak yang umumnya hanya menguasai kapling tanah berdasarkan garapan (membuka hutan), sering diambil oleh pendatang termasuk etnis Madura.....Namun, peristiwa demi peristiwa yang menyakiti hati orang Dayak, tidak ada reaksi keras....."

Pernyataan ini mengandung sesat pikir berupa *Fallacy of Dramatic Instance* dan *Mitos Deviant*. Sesat pikir yang yang pertama menunjukkan dimana terjadi *overgeneralized* bahwa seolah-olah ketika ada etnis Madura yang

mengusasi tanah Suku Dayak mengakibatkan banyak orang Dayak terpinggirkan. Maka setiap etnis Madura -yang menguasai tanah- dianggap jahat, karena melakukan pengambilan tanah orang Dayak. Padahal seringkali terjadi, pendatang mempunyai etos kerja tinggi untuk dapat *survival* justru karena dirinya adalah pendatang. Sehingga, peminggiran suku Dayak -jika memang terjadi- bukanlah harus dijadikan alasan penguat bahwa orang Madura penyebabnya.

Model kesalahan berpikir yang demikian jelas menunjukkan terjadinya fenomena *Post Hoc Ergo Propter Hoc*. Jenis kesalahan berpikir ini adalah menganggap bahwa suatu keadaan merupakan penyebab dari keadaan yang lain. Menurut Jalaluddin Rahmat (1999; 13) apabila ada peristiwa yang terjadi dalam urutan temporal, maka kita menyatakan bahwa yang pertama adalah sebab dari yang kedua.

Kedatangan kaum pendatang yaitu masyarakat Madura di perkampungan Dayak, yang kemudian dianggap berimplikasi dalam menggeser masyarakat asli (suku Dayak) merupakan alur *Post Hoc Ergo Propter Hoc*. Artinya, kedatangan masyarakat Madura dianggap sebagai sebab terpinggirkannya suku Dayak. Padahal tidak selamanya proses pergeseran (kepemilikan) tanah misalnya, sebagai bagian dari kedatangan masyarakat Madura.

Kesimpulan yang demikian jelas membawa kita untuk melakukan *generalisasi* atas satu dua kasus. Oleh karena itu, menurut Alfred Korzybski sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat (1999; 10) ada baiknya dalam berpikir kita melakukan *dating* (penanggalan). Kalau menulis sesuatu, tulislah hari dan tanggalnya, apalagi ketika menilai orang lain. Munculnya *stereotype*

pada benak kita merupakan salah satu akibat dari kesalahan berpikir seperti ini. Misalnya, ada orang Batak yang menyakiti hati Anda saat pertama kali anda berjumpa dengannya. Pada perjumpaan lain, seorang Batak lain menyakiti hati Anda lagi. Biasanya, tidak harus sepuluh orang, tiga saja sudah cukup untuk membentuk *stereotype* pada diri Anda bahwa semua orang Batak galak.

Sehingga, meminjam terminologi Korzybski di atas untuk membereskan *fallacy of dramatic Instance* ini, jika Anda bertemu dengan orang Batak, Anda harus membuat indeks. Batak-4 tidak sama dengan Batak-3, Batak-2 tidak sama dengan Batak-5. Dengan demikian satu dua kasus yang menimpa anda oleh orang Batak tidak serta merta mempunyai makna dan kesimpulan bahwa semua orang Batak mempunyai karakter sama dengan yang menyakiti Anda.

Pada persoalan pernyataan Gimong Awan di atas perihal kerusuhan etnis antara Dayak dan Madura, bahwa sesat pikir yang ketiga adalah adanya *mitos deviant*, yaitu kecenderungan membenarkan setiap bentuk kepercayaan yang sesungguhnya tidak mesti benar atau mitos. Mitos *deviant* ini berawal dari pandangan bahwa masyarakat itu stabil, statis, dan tidak berubah. Walaupun ada perubahan itu adalah penyimpangan dari sesuatu itu adalah penyimpangan dari sesuatu yang stabil (Jalaludin Rahmat, 1999; 22).

Pernyataan Gimong Awan bahwa orang Dayak sangat mudah beradaptasi, bertoleransi tinggi, tidak menyukai kekerasan, cenderung mengalah, dan sebagainya, merupakan sebuah kepercayaan atas orang Dayak yang -bisa- berkembang sebagai mitos. Karena pernyataan seperti ini mengandung sebuah kesimpulan (*implisit*) bahwa kalau kemudian terjadi kekerasan antara Suku Dayak

dan Suku lain, misalnya Madura, maka suku lainlah yang dianggap sebagai penyebabnya. Hal ini mengingat ada mitos bahwa orang Dayak adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Gimong Awan, sehingga tidak mungkin melakukan kekerasan massa.

Apa yang ditulis oleh Giwong Awan ini, jelas kontraproduktif bagi pemulihan dan penyelesaian atas kasus konflik SARA tersebut, karena lebih mengunggulkan (kebaikan) salah satu pihak yang berseteru dan cenderung menenggelamkan pihak lain. Dalam penafsiran tersebut, orang Madura (selalu) berada dalam posisi yang salah –bagaimanapun keadaannya- dan mudah untuk disalahkan. Apalagi keadaan tersebut diikutsertai dengan *stereotype* atas orang-orang Madura selama ini yang cenderung *bias* turut pula memperparah deretan panjang ‘kesalahan’ masyarakat Madura tatkala terjadi konflik yang melibatkan dirinya.

Reproduksi tentang kesalahan masyarakat Madura dalam konflik di atas juga dilakukan oleh Tiel Jelau seorang Tokoh suku Dayak Kharismatik (saudara kandung gubernur pertama dan pahlawan nasional Tjilik Riwut (alm)) yang meminta seluruh senjata tajam yang disita petugas dari massa (suku Dayak) di sepanjang Kasongan-Pundu, Ampalit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Timur, segera dikembalikan kepada pemiliknya (Kompas, 20 Desember 2000). Menurutny, senjata tersebut mempunyai nilai historis bagi suku Dayak:

“.....mandau (senjata khas suku Dayak), tombak, dan sumpit merupakan senjata yang memiliki arti tersendiri dan merupakan identitas suku Dayak.....”

Pilihan terminologi identitas suku Dayak tersebut seolah memberikan sebuah penekanan bahwa penyitaan senjata tersebut berimplikasi pada pudarnya identitas suku Dayak. Setiap identitas, meskipun digunakan sebagai alat untuk melakukan pembantaian, sebagaimana masyarakat Madura menggunakan celurit, harus dihargai dan tidak boleh disita. Sebagai tokoh masyarakat Dayak, maka Tiel Jelau menggunakan otoritasnya untuk mempengaruhi atau *pressure* kepada kepolisian untuk mengembalikan senjata sitaan. Penggunaan otoritas untuk memberikan argumen atas kepemilikan senjata untuk konflik inilah yang kemudian dinamakan sebagai *Argumen ad Verecundiam*; yaitu berargumen dengan menggunakan otoritas, walaupun otoritas itu tidak relevan atau ambigu.

Meskipun dalam keadaan tertentu, argumen dengan menggunakan otoritas diperlukan (apalagi memang mandau adalah identitas suku Dayak), tetapi dalam konteks konflik yang melibatkan dua kelompok dengan identitas yang berbeda, maka penyitaan senjata adalah langkah minimal yang ditempuh untuk mengurangi penggunaan senjata, meski itu adalah identitas masing-masing kelompok. Setiap identitas, tidak serta merta dapat berguna secara positif, sebagaimana *mandau* (khas Dayak) dan juga *celurit* (khas Madura). Karenanya, penyitaan atas mandau sesungguhnya tidak berhubungan dengan persoalan identitas suku Dayak, melainkan langkah minimal kepolisian.

Pernyataan Tiel Jelau selanjutnya menjadi semakin membuktikan terjadinya kesalahan berpikir, dan cenderung 'berbahaya'. Ketika ia menolak kalau kerusuhan di Ampalit merupakan tindakan suku Dayak untuk mengusir pendatang:



'.....tidak benar kalau kami mengusir pendatang. Kami hanya menegakkan keadilan bahwa tindak kriminal harus diproses secara hukum....' (Kompas, 20 Desember 2000)

Pilihan kata-kata tersebut mempunyai kesimpulan tersebut betapa perilaku pembunuhan secara massal (*genocida*) yang dilancarkan oleh suku Dayak ( mungkin juga oleh masyarakat Madura) adalah bagian dari upaya penegakkan keadilan dengan dalih memberantas kriminalitas, yang dalam terminologi ini jelas ditujukan kepada masyarakat Madura. Artinya, pernyataan tersebut mengandung kesimpulan, *pertama*, masyarakat Madura adalah pelaku kriminal dan *kedua*, tindak kriminal harus ditindak secara hukum, maka *ketiga*, pembantaian massal terhadap masyarakat Madura (dianggap) sebagai tuntutan hukum yang harus ditegakkan karena mereka adalah pelaku kriminal.

Dalam hukum positif, pelaku kriminal harus diproses. Logika demikian memang diakui kebenarannya, tetapi ketika persoalan itu menyangkut konflik antara Dayak dan Madura, maka persoalannya sangat sulit untuk menjatuhkan vonis bahwa yang satu adalah pelaku kriminal dan yang satunya sedang berupaya memberantas kriminalitas. Apalagi reproduksi kata kriminal justru dibuat oleh salah satu pihak yang sedang bertikai, maka implikasinya dapat memberikan legitimasi atas kekerasan atas orang Madura oleh masyarakat Dayak.

Pilihan kalimat yang nyaris sama dalam memberi komentar atas konflik tersebut juga dibuat oleh Prof. KMA Usop dan Sabran Achmad dari Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT), bahwa:

'.....pada dasarnya suku Dayak tidak pernah anti terhadap kehadiran pendatang. Hanya saja, kalau pendatang ingin berbuat seenaknya di daerah ini, jelas akan mendapat perlawanan. Jika pendatang bisa membawa celurit secara bebas, namun penduduk lainnya di tangkap. Kenyataan ini menjadi pemicu kerusuhan di Ampalit.....' (Kompas, 19 Desember 2000)

Apa yang diintrodusir oleh Prof. KMA Usop dan Sabran Achmad ini semakin menambah deretan panjang 'kesalahan' masyarakat Madura, utamanya di mata orang-orang Dayak. Secara implisit, keduanya, berkeinginan untuk mengatakan bahwa kaum pendatang (masyarakat Madura) telah berbuat seenaknya (...*kalau kaum pendatang berbuat seenaknya...*), sehingga memaksa masyarakat Dayak memberikan perlawanan atas perbuatan (seenaknya) orang-orang Madura. Pilihan kata *kalau* seolah memberikan suatu penekanan bahwa kaum pendatang telah berbuat seenaknya kepada masyarakat Dayak, sehingga berakibat pada munculnya perlawanan atas perbuatan seenaknya tersebut.

Pernyataan-pernyataan seperti ini disamping sangat sulit dipertanggungjawabkan secara logis, juga cenderung menyederhanakan peristiwa kerusuhan massal yang berujung pada pembunuhan terhadap orang-orang Madura. Artinya, karena.....*orang Madura bawa celurit seenaknya.....*, dan seolah dibiarkan oleh aparat, maka ketika suku Dayak membawa mandau seharusnya juga dibiarkan untuk melakukan perlawanan. Minimal, diperbolehkan membawa mandau juga sebagaimana orang Madura membawa celurit.

Dalam konteks ini bukan berarti masyarakat Madura benar dan suku Dayak salah, tetapi (penelitian ini) hanya memberikan tekanan bahwa pengambilan kesimpulan dan juga pilihan pernyataan atas realitas konflik sosial, *siapapun dan kapanpun*, akan mudah menyesatkan atau tertimpa kesalahan

berpikir. Apalagi bila reproduksi pernyataan yang dibuat sangat kental dengan kepentingan politik, keberpihakan serta emosionalitas. Penelitian ini juga tidak berpretensi untuk membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain, tetapi hanya mengungkapkan fenomena kesalahan berpikir dalam melihat realitas konflik sosial tersebut, dari siapapun, kapanpun dan dimanapun. Kalau kemudian yang banyak ditemukan adalah pernyataan yang lebih membenarkan suku Dayak dan menyalahkan masyarakat Madura, karena penelitian ini menggunakan metode acak terhadap harian Kompas, tanpa mengurutkan hari dan peristiwanya.

Persoalan yang sama terjadi ketika para tokoh dan pengamat sosial memberikan komentarnya terhadap kasus konflik berdarah di Ambon. Seorang pengamat politik yang cukup terkenal dari Universitas Indonesia, Chusnul Mariyah (Kompas, 8 Desember 1999) mengatakan :

‘.....sebenarnya konflik merupakan hal wajar di tengah-tengah masyarakat....masalahnya adalah bagaimana mengatur konflik tersebut yang konstruktif dengan mencari akar permasalahannya.....’

Pernyataan ini membuktikan betapa logika konflik dianggap sebagai sebuah kewajaran atau keniscayaan sejarah yang mesti terjadi. Bagi, Chusnul Mariyah, yang penting adalah pengelolaan konflik agar ia dapat berkembang menjadi suatu keadaan yang konstruktif dalam masyarakat.

Penggunaan kalimat atau pilihan kata dari Chusnul Mariyah ini termasuk jenis *Fallacy of Restrospective Determinism*. Menurut Jalaluddin Rahmat (1999; 11) kesalahan berpikir ini merupakan suatu kebiasaan orang yang menganggap masalah-masalah sosial yang sekarang terjadi sebagai sesuatu yang secara historis memang selalu ada, tidak bisa dihindari, dan merupakan akibat dari sejarah yang

cukup panjang. Determinisme selalu saja lebih memperhitungkan masa silam daripada masa mendatang.

Chusnul Mariyah mencoba berpikir *restrospective* (melihat ke belakang) atau historis dari sejarah panjang konflik dalam peradaban manusia, dimanapun, dan menganggap bahwa konflik itu muncul seakan-akan sudah ditentukan (*determined*) di dalam sejarah yang lalu. Konflik memang selalu ada dalam masyarakat, tetapi bukan kemudian berarti bahwa konflik menjadi sebuah keharusan dalam sebuah sejarah. Pilihan kata *yang penting adalah mengatur konflik tersebut yang konstruktif* dari keseluruhan kalimat Chusnul Mariyah dapat bermakna ganda yang seolah-olah membenarkan secara teoritis terjadinya konflik yang meluas. Apalagi ketika konflik yang dimaksud misalnya, mengusung atau berdimensikan agama sebagai katalisatornya, sebagaimana yang terjadi dalam konflik di Ambon. Penerjemahan kata *konflik* akan sangat beragama dalam persepsi masyarakat, sehingga terminologi *mengatur konflik yang konstruktif* dapat berujung pada pembenaran teoritis atas fakta adanya konflik berdarah di Ambon.

Konflik atas nama agama secara historis memang pernah terjadi, tetapi tidak serta bahwa keadaan tersebut harus digunakan sebagai alasan pembenar. Pernyataan yang cukup 'berbahaya' (dalam artian mengandung implikasi negatif yang cukup mendasar) –dalam konteks ini- adalah pernyataan Menteri Agama Tolhach Hasan (Kompas, 15 Desember 1999) setelah menghadiri rapat tertutup Panitia Kerja (Panja) mengenai Ambon di Gedung MPR/DPR,

'.....agama **sesungguhnya juga** mempunyai kekuatan integrasi, tergantung dari penghayatan umatnya terhadap agama masing-masing.....'

Penggunaan kata *sesungguhnya juga* yang merupakan penjelasan lebih lanjut tentang kata agama, memberikan makna membenaran adanya dimensi konflik yang dimunculkan oleh agama. Selain memiliki kekuatan integrasi, berarti agama juga mempunyai kekuatan untuk memisahkan, terlihat dari penekanan kata *sesungguhnya juga*. Meskipun realitas menunjukkan bahwa agama mempunyai kekuatan yang sifatnya paradoks, sebagaimana dimaksud oleh Tolchah Hasan, tetapi hal tersebut tidak kemudian bisa menjadi alat pembenar munculnya konflik, terutama bagi masyarakat yang memahaminya.

Kalau menggunakan pendekatan Jalaluddin Rahmat (1999), apa yang diintrodusir oleh Menteri Agama, Tolchah Hasan merupakan *fallacy of Dramatic Instance* dan *Post Hoc Ergo Propter Hoc*. Pada jenis yang pertama, Menag telah melakukan *over-generalized* atas satu dua (kasus) ajaran agama yang secara implisit mengandung konflik. Bahwa pernah terjadi konflik karena ada penafsiran atas ajaran agama yang berdimensikan konflik memang benar, tetapi menjadi tidak arif bila kemudian seorang tokoh publik, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama, melontarkan pernyataan yang seolah memberikan alasan pembenar betapa konflik memang ada dalam ajaran agama, meski tidak harus dibenarkan.

Sedangkan pada jenis kedua, Menag Tolchah Hasan memberikan suatu alasan pembenar tentang penyebab terjadinya konflik di Ambon yang berdimensikan agama. Terminologi *sesungguhnya juga*, juga mengandung alasan

penyebab bahwa telah terjadi konflik yang disebabkan (*post hoc*) oleh agama. Padahal –bisa saja- penyebabnya adalah persoalan ekonomi atau politik, tetapi dengan menggunakan agama sebagai faktor peletupnya. Faktor inilah yang menjadikan kerusuhan semakin *sexist* dan mendasar, karena agama diikutsertakan dalam bagian dari konflik.

Secara historis, memang bahwa sejarah agama-agama, atau mungkin tepatnya sejarah sosial berabad-abad menunjukkan bahwa struktur internal dari agama-agama tersebut (baik institusi ajaran, kegiatan misi, kepemimpinan) telah melahirkan potensi konflik. Tidak bisa dipungkiri, khususnya di masa lalu, konflik-konflik antar agama acapkali dipicu oleh perbedaan doktrinal yang dipelihara sebagai keyakinan absolut. Sudah barang tentu harus diakui pula bahwa ada banyak faktor ‘non-agama’ (seperti faktor ekonomi, sosial, kultural, politik dan keamanan) turut serta menjadi bagian yang melahirkan perseteruan serta konflik tersebut (Th. Sumartana, dkk, 2001; 79). Tetapi, melibatkan agama dalam melihat konflik di Ambon, apalagi dikemukakan oleh pejabat publik, akan semakin memperuncing dan mengendapkan konflik pada dimensi yang substansial serta semakin sulit untuk diselesaikan.

Menariknya, berbagai pernyataan yang dikeluarkan untuk memahami peristiwa konflik sosial antar etnis dan ‘agama’ di atas, tidak saja dikeluarkan untuk ‘membaca’ kasus tersebut dalam sisi konfliknya, tetapi juga dikeluarkan oleh tokoh dan pengamat lainnya dalam rangka untuk melihat konflik dalam sisi yang berbeda, utamanya dalam soal semakin berlarut-larutnya konflik tersebut.

Sekjen Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) Letjen TNI (Purn) Soeyono, misalnya, justru melihat dari problem dominasi militer yang berkurang sebagai salah satu sebab tidak pernah selesainya secara tuntas persoalan konflik berbau SARA di Indonesia. Dalam Kompas (10 Februari 1999), ia mengatakan :

‘.....banyaknya kerusuhan antar sipil yang memakan korban dan kerugian harta benda telah mengancam eksistensi serta keutuhan negara. Ancaman perpecahan itu hampir sama dengan ketika Indonesia menganut paham demokrasi liberal.....ketika itu Indonesia menganut demokrasi liberal, peranan militer dalam penyelenggaraan kehidupan negara hampir tidak dominan. Saat itu Indonesia menghadapi pemberontakan bersenjata yang mengancam eksistensi dan keutuhan negara.....’

Pernyataan Letjen TNI (Purn) Soeyono ketika membuka seminar Hubungan Sipil Militer di Lemhamnas tersebut kalau dipahami secara mendasar tampaknya sebuah kalimat yang tersembunyi di dalamnya, yaitu bahwa dengan tidak dominannya militer dalam kehidupan bernegara, telah mengakibatkan kerusuhan antar sipil di Indonesia tidak pernah dapat diselesaikan dengan tuntas. Kalau dirunut secara logis, apa yang diintrodusir Soeyono berintikan: *premis 1* militer di era sekarang tidak dominan, *premis 2* kerusuhan antar sipil semakin memakan korban yang banyak, *konklusinya* agar kerusuhan antar sipil tidak memakan korban lagi, maka militer harus dominan.

Secara implisit, pernyataan tersebut bermakna *historis* bahwa pada masa sebelumnya telah terbukti bahwa dominasi militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mampu menghilangkan setiap potensi munculnya kerusuhan antar sipil. Justru, dengan era reformasi yang ditandai dengan keinginan kuat mengembalikan militer kedalam baraknya, dalam logika Letjen TNI (Purn)

Soeyono adalah salah satu penyebab hilangnya dominasi militer. Era reformasi yang berhasil menurunkan kekuasaan rezim Soeharto (seolah) kemudian berimplikasi kepada kemampuan militer untuk menyelesaikan problem kerusuhan antar sipili.

Hal yang sama tampaknya juga pernah dikemukakan oleh Jendral TNI (Purn) Edi Sudrajat (Kompas, 30 Desember 1998), yang mengatakan :

'.....dulu selama 32 tahun mengawal kekuasaan Soeharto, aparat keamanan begitu sigap dan kukuh dalam mengatasi masalah instabilitas nasional, tetapi setelah Soeharto turun tiba-tiba aparat menjadi tidak berdaya mengatasi keamanan yang begitu penting secara nasional.....'

Dengan demikian, secara implisit jelas termuat sebuah kesimpulan betapa militer hanya berkepentingan untuk mengawal kekuasaan Soeharto selama 32 tahun, dan buktinya stabilitasnasional terjamin. Ketika rezim Soeharto runtuh, maka militer (seolah) tidak berkepentingan untuk menjaga stabilitas nasional. Namun demikian, kalimat di atas mempunyai makna ganda, *di satu sisi*, Edi Sudrajat memberikan bukti bahwa selama 32 tahun pada kekuasaan Soeharto, militer sanggup mengatasi stabilitas nasional, tetapi *di sisi lain*, dia mempertanyakan ketidakmampuan militer mengatasi intsabilitas nasional yang terjadi, padahal sudah teruji selama 32 tahun.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa pernyataan-pernyataan di atas merupakan *Post Hoc Ergo Propter Hoc*, bahwa disebabkan berkurangnya dominasi militer, mengakibatkan kerusuhan sosial antar sipil tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Artinya, kerusuhan sosial antar sipil adalah akibat logis (*Propter Hoc*) sebuah sebab yaitu berkurangnya dominasi militer (*Post Hoc*). Pola



berpikir yang demikian, apabila dikembangkan dan disebarluaskan dalam ranah *kognisi* masyarakat (publik) akan berakibat pada asumsi; kalau demikian era reformasi ternyata berakibat pada memburuknya situasi negara Indonesia, maka saatnya kita kembali pada keadaan yang lalu.

Realitas ini kalau tidak disadari akan memunculkan sebuah gejala yang cukup nyata yaitu lahirnya krisis kepercayaan terhadap bangsa Indonesia sekarang ini (pasca rezim Soeharto) tentang kemampuan dirinya untuk mengatasi krisis dan membangun masa depan yang baru. Menurut Ignas Kleden (dalam Frans Farera, peny., 1999; 3) adapun sebuah gejala yang cukup nyata dari krisis kepercayaan ini adalah perasaan letih dalam menghadapi krisis dan kejenuhan menghadapi serba gejala dari masyarakat. Muncullah apa yang kemudian disebut sebagai gejala mental *fatigue* menghadapi perubahan dan kegetiran melihat transisi dan ekguncangan yang diakibatkan oleh reformasi. Hal ini tampak dari sebuah pernyataan beberapa anggota masyarakat di Jakarta dalam sebuah polling yang dilakukan Kompas (23 September 1999) yang intinya adalah 'daripada membiarkan keadaan tidak menentu ini berlarut-larut maka kita mungkin harus realistis untuk menerima kembali suatu pemerintahan otoriter terbatas yang diberi waktu dua tahun, misalnya'.

### **C. Kesalahan Berpikir dalam Konstruksi Nalar 'Negara'**

Selain temuan di atas, penelitian ini juga menemukan berbagai bentuk pernyataan yang mengandung kesalahan berpikir dalam politik kekuasaan. Artinya, kesalahan berpikir ternyata juga banyak terjadi tidak hanya dalam

'pembacaan' masyarakat atas konflik sosial di Ambon, Sambas dan Aceh, tetapi juga mudah muncul dalam konteks perebutan kekuasaan dalam konstelasi perpolitikan nasional. Hal ini dianggap wajar karena dalam media massa (pers) selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi politisi dan pengamat sosial-politik untuk memproduksi bahasa lewat pernyataan-pernyataannya.

Willian J. Small (1972; 76) mengatakan bahwa pers bagi para politisi itu ibarat cermin di pagi hari, di mana ia bisa melihat diri sendiri. Lewat pers tindak-tanduknya (dan kapasitasnya, pen.) dinilai, hingga terbentuklah imaji massa tentang dirinya. Politisi (dan pengamat, pen.) dan massa, baik pendukungnya maupun bukan dihubungkan oleh pers. Dalam konteks ini menurut Bimo Nugroho, dkk (1999; 11) maka wajar jika para politisi menghitung kekuatan pers, lantaran pers bisa dalam hitungan waktu singkat melambungkannya atau sebaliknya menghempaskan mereka sampai jurang yang paling dalam.

Harus diakui bahwa pers Indonesia pasca jatuhnya rezim Soeharto mengalami liberalisasi yang cukup signifikan. Transisi demokrasi sebagai akibat runtuhnya rezim otoriter telah mengubah wacana politik sangat berarti dengan memberi arti bagi menguatnya kebebasan pers. Kebebasan pers ini kemudian dimanfaatkan oleh politisi dan pengamat untuk saling berlomba-lomba mengeluarkan pernyataan-pernyataan agar dimuat dalam 'ruang' yang diberikan oleh pers. Meski tetap harus diakui bahwa kekuatan pers liberal tetap tidak dikendalikan oleh para politisi dan pengamat, melainkan oleh para jurnalisnya. Sehingga, tidak berlebihan bila dalam konteks ini pers (media massa) sanggup melakukan manipulasi pernyataan (fakta) bahkan mereduksinya dalam sebuah

distorsi. Hal ini tampak jelas ketika seringkali terjadi klarifikasi oleh tokoh dan pengamat politik atas pernyataan yang dibuat di media massa tertentu.

Terlepas dari problem ini, penelitian ini, sebagaimana dijelaskan pada bab awal tidak difokuskan pada proses manipulasi data oleh media massa, tetapi tetap berusaha untuk membongkar berbagai pernyataan yang acapkali muncul di media massa melalui analisis wacana atas teks tersebut. Artinya, diluar problem manipulasi media massa, setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh tokoh dan pengamat sosial politik dapat berimplikasi negatif apabila ia dikonstruks secara negatif pula. Pembentukan pernyataan melalui pilihan-pilihan kalimat tertentu seringkali memiliki makna tersembunyi, apalagi bila pernyataan tersebut berkonotasi politik.

Misalnya, persoalan keinginan lepasnya Timor-Timur (Timtim) dari pangkuan Indonesia ternyata memberikan tafsiran beragam atas problem tersebut. Banyak pihak menganggap, bahwa keinginan lepasnya Timtim merupakan suatu bentuk kegagalan pemerintah Indonesia (negara/state) dalam menjalankan diplomasi luar negerinya (Kompas, 5 Februari 1999). Kegagalan tersebut berimplikasi pada dukungan masyarakat Internasional atas tuntutan referendum (merdeka) masyarakat Timtim.

Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh Menteri Ali Alatas (Kompas, 6 Februari 1999) bahwa persoalan Timtim merupakan kegagalan bersama, bukan sebagai kegagalan diplomasi.

'.....persoalan Timtim bukanlah sbgaa akibat kegagalan diploasi di luar negeri, melainkan merupakan kegagalan bersama. Bahwa setelah 23 tahun kok Timtim masih menjadi persoalan.....'

Pernyataan Ali Alatas ini jelas merupakan bagian dari keinginan negara (*state*) untuk lepas tangan atas persoalan yang menimpa Timtim. Bahwa Timtim selama 32 tahun telah menjadi bagian integral bangsa Indonesia adalah proses kesepakatan semua elemen bangsa. Tetapi, kalau kemudian ia menjadi bangsa yang merasa gagal menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dalam perspektif Menlu Ali Alatas adalah kegagalan bersama menjadikan mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Pilihan kata *kegagalan bersama* merupakan salah satu bukti betapa negara (*state*) berusaha melepaskan tanggung jawabnya untuk memelihara keutuhan bangsa ini. Tampaknya terminologi Andre Ate Ujan (Tim Maula, ed., 1999; 57) benar ketika ia mengatakan bahwa yang menjadi pola umum dari penguasa selama ini adalah bahwa setiap krisis dan gejolak sosial harus menjadi tanggung jawab bersama.

Stereotipe ini rupanya berangkat dari tesis dasar bahwa suatu negara adalah hasil kesepakatan bersama. Karena itu, juga menjadi kewajiban dan tanggung-jawab bersama untuk memeliharanya. Posisi politik seperti ini tentu saja ada benarnya. Tetapi, berangkat dari tesis ini, setiap kesalahan lalu dilihat sebagai kesalahan bersama dan, karena itu juga, menjadi tanggungjawab bersama. Hal ini justru merefleksikan suatu etos politik yang rancu. Artinya, negara –dalam konteks ini adalah Menlu Ali Alatas- selalu berupaya untuk melemparkan setiap bentuk kesalahan yang diperbuatnya sebagai tanggungjawab bersama, bukan hanya negara.

Pernyataan Menlu Ali Alatas jelas menunjukkan kesalahan penerapan logika berpikir dan mengandung sejumlah paradoks di dalamnya. Lalu, bagaimana halnya dengan pertanggungjawaban atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh negara (penguasa) ? Apakah masyarakat juga harus dilibatkan sebagai bagian dari penyimpangan bersama, sehingga mereka harus dihukum atau digugat ? Tampaknya, pemahaman seperti ini sebagai akibat – meminjam terminologi Andre Ate Ujan- sebagai *kolektivitas naif* atau kebersamaan yang tidak jelas dan ironi.

Pernyataan *kegagalan bersama* dari Menlu Ali Alatas di atas juga memberikan suatu strategi politik negara dalam melepaskan diri dari kewajiban moral maupun legal untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat. Terminologi tanggung jawab bersama –sesungguhnya- memberikan suatu makna implisit bahwa tidak ada lagi yang dimintai tanggung jawab atas perbuatan negara. Sebagaimana dikatakan oleh Hanand Arendt (Tim Maula, ed, 1999, 58):

‘.....ketika dikatakan bahwa semua orang bertanggungjawab, sesungguhnya hal ini berarti bahwa tidak ada seorangpun bertanggungjawab. Sebab, dalam tanggungjawab bersama sesungguhnya tidak ada alamat yang tegas dan jelas kemana pertanggungjawaban itu diminta. Kerena itu jelaslah bahwa tanggungjawab bersama batrangkali menjadi ideologi politik.....’

Dalam konteks ini, maka jelaslah betapa pernyataan Menlu Ali Alatas merupakan strategi politik dari negara untuk untuk menancapkan ideologi politiknya. Namun, harus disadari betapa pada saat yang sama, hal itu bisa menjadi kendala tuntutan perubahan, karena segalanya menjadi kabur dan tidak transparan. Dimana, tang-

gungjawab bersama dapat menjadi ideologi politik yang efektif bagi penguasa (negara) yang tidak tahu (mau) bertanggungjawab.

Jalaluddin Rahmat (1999; 19) menyebut pola berpikir sebagaimana Menlu Ali Alatas tersebut sebagai *Fallacy of Composition*, yaitu kesalahan berpikir yang dilatarbelakangi oleh penggunaan komposisi (misal: asumsi dasar) pernyataan yang salah, sehingga berimplikasi pada kesalahan dalam menafsirkan kenyataan yang hendak dipahaminya. Misalnya, dalam kasus Menlu Ali Alatas, kesalahannya terletak dari penggunaan kalimat *tanggungjawab bersama* sebagai implikasi dari adanya asumsi dasar bahwa negara (*state*) terbentuk sebagai kesepakatan bersama, sehingga segala kesalahan yang dilakukan oleh negara menjadi kesalahan bersama.

Pernyataan yang nyaris sama juga dikeluarkan oleh Habibie (Kompas, 12 Februari 1999) ketika ia –dalam kapasitasnya sebagai Presiden- mengatakan bahwa pada tanggal 1 Januari 2000 nanti, Timor Timur tidak lagi menjadi beban bagi bangsa Indonesia. Pernyataan ini secara implisit memberikan suatu pembenaran betapa Timtim selama 32 tahun menjadi beban bagi negara, utamanya pada pemerintahan Presiden Habibie. Sehingga, dengan memberikan opsi untuk *referendum* bagi Timtim dalam pandangan Habibie dianggap sebagai pelepasan salah satu per-soalan yang membebani bangsa Indonesia.

‘.....mulai tanggal 1 Januari 2000 mendatang, Timtim sudah tidak lagi menjadi beban bagi kita. Karena kita telah memberikan jalan bagi Timtim untuk memilih menjadi bagian dari Indonesia atau lepas menjadi bangsa yang merdeka.....Sehingga, saat itu Pemerintah Indonesia hanya akan memusatkan perhatiannya pada 26 propinsi dan tidak diganggu lagi dengan masalah Timtim....’

Pernyataan ini memberikan makna yang sama dengan apa yang dilontarkan oleh Menlu Ali Alatas di atas, yaitu sama-sama mencoba melepaskan diri secara implisit dari suatu tanggungjawab negara atas kondisi daerah yang menjadi bagian kekuasaannya. Selama 32 tahun Timtim bergabung dengan negara Indonesia, ternyata bagi Habibie dianggap sebagai beban yang mengganggu bagi perjalanan sejarah bangsa ini. Apalagi penggunaan kalimat *lepas menjadi bangsa yang merdeka* seolah semakin membenarkan bahwa bangsa Indonesia melakukan penjajahan kepada bangsa Timtim selama 32 tahun. Sebab, kalimat *menjadi bangsa yang merdeka* secara eksplisit berarti bahwa bangsa (Timtim) berada dalam cengkeraman penjajahan (bangsa Indonesia). Kalau demikian halnya, maka yang menjadi persoalan sesungguhnya, bukan 32 tahun Timtim menjadi beban bagi kita, justru selama 32 tahun kita (bangsa Indonesia) menjadi beban bagi mereka (bangsa Timtim).

Pernyataan-pernyataan pejabat publik yang demikian adalah representasi dari betapa mudahnya media masa menyediakan ruang bagi mereka untuk mereproduksi pernyataan sesuai dengan keinginan dan kepentingan politiknya serta ideologinya. Realitas ini semakin memperkuat tesis Gramsci (1971) bahwa media merupakan arena pergulatan antarideologi yang saling berkompetisi (*the battle ground fo competing ideologies*). Berbagai kepentingan politik dan ideologi mudah direpresentasikan oleh media.

Ketika nalar negara, dalam konteks ini adalah pemerintah Habibie, menggunakan media massa untuk menyebarkan secara *perpassive* pola pikir negara dalam ruang kesadaran masyarakat, maka media massa –meminjam

terminologi Karl Deutsch- (dalam Effendy, 2000: 325) telah berperan sebagai 'urat nadi pemerintah' (*the nerves of government*). Habibie sebagai 'negara' sangat berkepentingan untuk menginformasikan kepada publik bahwa kebijakan politik memberikan *opsi* referendum bagi Timtim adalah benar, karena 32 tahun ia menjadi beban berat bagi bangsa Indonesia. Konsekuensi logisnya, beban berat itu harus disingkirkan, minimal dengan memberikan kemerdekaan bagi Timtim.

Dalam nalar negara, maka Timtim dianggap sebagai 'batu kerikil' yang menghambat laju perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Padahal gejolak di Timtim seharusnya dipahami sebagai sebuah persoalan kebangsaan yang menjadi tanggungjawab bagi negara untuk menyelesaikannya. Bukan dengan melemparkan menjadi tanggungjawab bersama.

#### **D. Kesalahan Berpikir dalam Politik Kekuasaan: *Sekitar Rebutan Pengaruh dalam Kekuasaan***

Konstelasi politik nasional pasca berakhirnya rezim Orde baru ditandai dengan munculnya berbagai partai politik yang siap untuk menjadi peserta pemilu. Kondisi tersebut diakui memang menjadi salah satu bagian dari munculnya kebebasan untuk menyampaikan ekspresi politiknya secara bebas. Setelah 32 tahun lebih ekspresi politik masyarakat diberangus dengan kebijakan penyederhanaan partai politik, maka kondisi awal reformasi seolah menjadi momentum munculnya *euphoria* politik masyarakat.

Keadaan demikian mendorong munculnya berbagai pernyataan dan komentar atas kondisi perpolitikan nasional, utamanya berkaitan dengan politik kekuasaan. Tiap partai politik melalui tokohnya berlomba-lomba memberikan



komentar melalui media massa. Keinginan kuat untuk memberikan pernyataan atau mungkin juga media massa memburu para tokoh tersebut untuk dimintai keterangannya tentang suatu peristiwa mendorong munculnya berbagai pernyataan yang secara tidak disadari mengandung *paradoks* (bermakna ganda), mempunyai kesimpulan tersembunyi (*implisit*) dan tidak jarang yang justru memberikan pernyataan yang menurut alur logika berpikir logis termasuk *fallacy* (kesalahan berpikir).

Pernyataan tersebut misalnya menyangkut soal larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpolitik. Seorang Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Syarifuddin S misalnya yang kebetulan adalah seorang PNS yang lebih memilih tetap sebagai pengurus partai Golkar dan melepas baju PNS-nya. Pilihan politik seperti ini sesungguhnya wajar, tetapi menjadi tidak wajar ketika alasan yang dikedepankan dalam menentukan pilihan politiknya.

‘.....sangat tidak etis kalau saya meninggalkan Golkar yang membesarkan saya. Dalam keadaan saat ini Golkar membutuhkan pertolongan. Lalu siapa yang akan menolong Golkar kalau ia ditinggal oleh kader-kader terbaiknya yang pernah dibesarkannya. Apalagi Golkar juga telah berjasa mengantarkan bangsa ini dalam kemajuan masyarakat. Kalau Golkar salah seharusnya jangan dilihat Golkarnya dong, tetapi oknum di dalamnya .....’(Kompas, 6 Februari 1999)

Dalam pernyataan tersebut terdapat kata *membutuhkan pertolongan* untuk menunjukkan kesan bahwa Partai Golkar sedang menderita, minimal ‘dianiaya’ secara politik sejak jatuhnya rezim Orde Baru. Padahal secara institusional –seharusnya- Golkar memang bertanggung jawab (secara moral) atas terjadinya krisis sosial ekonomi, karena sejak awal ia telah memproklamkan diri sebagai partai pemerintah. Ketika pemerintahan rezim mengalami krisis kepercayaan, maka

konsekuensi logis adalah munculnya krisis kepercayaan dan ‘hujatan’ terhadap Golkar.

Penggunaan kata *telah berjasa mengantarkan kemajuan masyarakat dan kalau Golkar salah, maka jangan dilihat Golkarnya tetapi oknum didalamnya* adalah bukti dari strategi untuk keluar dari tanggung jawab atas keadaan yang sedang terjadi. Pilihan kata ini sebetulnya seperti *Post Hoc Ergo Propter Hoc*, bahwa setelah Golkar menjadi partai pemerintah dan diberi kesempatan menjalankan roda pemerintahan maka masyarakat menjadi semakin maju daripada sebelumnya. Padahal dengan mudah kita bisa membuktikan kesalahan ini dengan mengatakan: ‘Betul itu. Tetapi dulu pada tahun sekian sampai tahun sekian, sebelum Golkar memerintah, jumlah penduduk miskin sekian, setelah Golkar memerintah ternyata jumlah penduduk miskin bertambah’. Atau juga bisa dipatahkan dengan mengatakan: ‘ketika Golkar menjadi pemenang pemilu justru uang negara yang dikorupsi semakin banyak daripada pemerintahan sebelumnya’.

Sementara penggunaan kata *oknum di dalamnya* adalah bukti dari pelemparan tanggungjawab, sebagaimana dalam pembahasan awal bab ini. Penyebutan *oknum* adalah menunjuk pada terminologi yang tidak jelas, ditujukan kepada siapa. Padahal dalam konteks politik kekuasaan rezim Orde Baru, maka Golkar tetap harus dilihat secara institusional, bukan personal.

Kalau diperhatikan secara mendalam, dalam pernyataan Syarifuddin S tersebut mempunyai kesimpulan tersembunyi (implisit) bahwa dirinya adalah kader terbaik dari Golkar: *bagaimana nasib Golkar kalau ditinggal kader-kader terbaiknya*. Ketika dirinya mau melepas keanggotaannya sebagai PNS dan

memilih bertahan di Golkar seolah menunjukkan bahwa ia adalah kader terbaik yang bertanggungjawab. Kalimat ini memang tidak mengandung kesalahan berpikir, hanya menunjukkan ada penekanan untuk menonjolkan kemampuan *personal* saja, yaitu sebagai kader terbaik.

Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat tatkala memberikan komentar berkaitan dengan kesediaan dan kesiapannya sebagai calon presiden dari PKP (Kompas, 18 Februari 1999):

‘Seorang calon presiden tidak ujuk-ujuk tampil. Ia harus teruji paling tidak sejak lima tahun, sepuluh atau 20 tahun yang lalu, termasuk dalam hal wawasan kebangsaan’

Dalam pernyataan ini terdapat kesimpulan tersembunyi untuk melemahkan atau mematahkan peluang calon presiden yang lain, yaitu bahwa dirinya (Edi Sudrajat) sudah teruji secara empirik dalam pemerintahan Soeharto sehingga menganggap *representatif* untuk menjadi calon presiden. Apalagi dalam pernyataan tersebut terdapat kalimat *termasuk dalam hal wawasan kebangsaannya*. Kalimat ini jelas menekankan suatu syarat berupa kualitas semangat nasionalisme dari seorang calon presiden. Padahal ukuran dari *teruji dalam hal wawasan kebangsaannya* adalah sesuatu yang abstrak, kecuali kalau itu diletakkan dalam konteks pernah menduduki jabatan strategis dalam bidang wawasan kebangsaan. Hal itu berarti bahwa dirinya yaitu Edi Sudrajat adalah paling memenuhi syarat sebagai presiden, karena apa yang diutarakannya sesungguhnya berkeinginan untuk menyebut deretan panjang pengalamannya dalam pemerintahan. Apalagi biasanya kata wawasan kebangsaan selalu lekat

dalam identitas militer, dan Edi Sudrajat adalah seorang militer dengan pangkat tertinggi, sehingga tidak perlu lagi diragukan kadar wawasan kebangsaannya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Amien Rais yang juga menyatakan siap menjadi calon presiden. Sebagai calon presiden, Amien Rais juga berkepentingan untuk memberikan berbagai pernyataannya dengan menggunakan media massa. Sebagaimana diketahui, di awal gerakan reformasi, Amien Rais merupakan salah satu dari sekian tokoh yang paling sering dijadikan sumber atau referensi berita.

Salah satu pernyataan Amien Rais di harian Kompas (18 Februari 1999) berkaitan dengan syarat calon presiden Indonesia juga sangat mengedepankan alasan kepentingan politik kekuasaan yang ingin diraihinya. Sebagai calon presiden, sebagaimana Edi Sudrajat, Amien Rais mengajukan enam syarat untuk menjadi presiden. Sebagaimana Edi Sudrajat juga, syarat-syarat tersebut juga berkaitan dengan kemampuan yang melekat pada dirinya. Logikanya, jika seorang merupakan calon presiden dan kemudian ia menawarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon presiden, maka syarat tersebut pasti bersentuhan dengan keadaan dirinya. Hampir mustahil bila seorang calon presiden justru mengajukan syarat-syarat yang tidak mungkin dimiliki atau diraihinya.

'Seorang calon presiden harus memiliki, minimal enam syarat. Pertama, harus tokoh yang betul-betul memahami dasar filosofi negara. Kedua, memiliki visi jauh ke depan yang mampu membawa bangsa besau uni dalam percaturan internasional abad ke 21. Ketiga, memiliki pengetahuan umum yang cukup komprehensif sehingga tahu arti globalisasi. Keempat, bisa mendudukkan Indonesia pada dinamika masa depan yang sangat intens'

Penggunaan kalimat *harus tokoh yang betul-betul memahami dasar filosofi negara* ditekankan pada kualitas ketokohan yang sifatnya abstrak, karena menunjuk kepada siapa. Kalau hal tersebut ditujukan kepada dirinya sendiri (Amien Rais) dengan menyebut dirinya sebagai tokoh memang menjadi wajar dalam konstelasi perebutan kekuasaan. Tetapi kalau hal itu menunjuk pada kemampuan kualitas yang abstrak, maka pernyataan itu dapat terjebak pada *Fallacy of Misplaced Concreteness*, yaitu kesalahan berpikir yang mengkongkretkan sesuatu yang hakikatnya abstrak. Siapa yang ditunjuk dengan kalimat *tokoh yang betul-betul* jelas sangat sulit untuk ditunjukkan, kecuali kalau Amien Rais secara *implisit* berkeinginan mengarahkan masyarakat tentang kualitas abstrak tersebut kepada dirinya sendiri, apalagi ia juga merupakan salah satu dari calon presiden.

Pernyataan Amien Rais untuk mengajukan syarat yang lebih berhubungan dengan keadaan dirinya tampak jelas ketika sebelumnya (Kompas, 14 Februari 1999) ia membuat sebuah pernyataan yang menyarankan Habibie elegan untuk tidak bersedia dijadikan calon presiden oleh Partai Golkar:

'Saya mendukung (Habibie) memberikan keterangan untuk tidak ingin menjadi presiden lagi. Tetapi lebih dari cukup mengantarkan bangsa ini ke pemilu yang luber dan jurdil. Namanya akan ditulis dalam sejarah Indonesia dengan tulisan yang bagus. Akan tetapi kalau ia memang mau maju lagi, padahal dia adalah kadernya Pak Harto, maka saya khawatir jang-jangan rakyat malah tidak akan menerima'

Pernyataan ini jelas tendensius dengan cara memunculkan *stereotype* terhadap Habibie sebagai *kadernya Pak Harto*. Terminologi *kadernya Pak Harto* merupakan *stigma* yang direproduksi oleh gerakan yang berhasil menurunkan

rezim Soeharto. Realitas ini menjadi tidak ada bedanya ketika rezim Orde Baru – yang dikritik oleh Amien Rais- juga mereproduksi bahasa yang *stigmatig* atas kekuasaan Orde Lama.

Sekedar perbandingan atas situasi tersebut. Sebagaimana diketahui, masa lalu (Orde Lama) bagi Orde Baru adalah mimpi buruk: krisis ekonomi, gerakan separatis, huru hara politik dan percobaan kudeta berdarah. Harus diakui bahwa rezim Orde Baru telah berhasuk menjelmakan dirinya menjadi rezim tafsir dan bahasa yang membentuk kesadaran kognitif masyarakat untuk ‘membenci’ Orde Lama. Lihat misalnya, pembunuhan massal dalam skala raksasa pada 1965/1966 justru dimanfaatkan oleh rezim Orde Baru untuk menanamkan ke dalam benak publik sebuah citra bahwa massa Orde Lama adalah periode *khaos* dan penuh dengan kekacauan. Barangkali benar kalau Michael van Langenberg (Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, ed., 1996; 229) mengatakan :

Jelaslah, ini berarti Orba telah mengangangi kenangan atas sejarah penuh pembunuhan itu sebagai alat untuk memapankan legitimasinya. Pembunuhan-pembunuhan itu sendiri tak dipertimbangkan dalam sejarah resmi versi Orba.....bahwa kekerasan adalah akibat logis dari kekacauan Orde Baru, dan bukan awal dari yang Baru, Orde Baru sendiri diawali dengan penataan-ketertiban.

Dalam konteks ini, tampaknya apa yang dikemukakan oleh Amien Rais menjadi tidak berbeda dengan model reproduksi bahasa yang dilakukan oleh Orde Baru. Pilihan kata *dia* (Habibie) adalah *kadernya Pak Harto* tersebut merupakan bukti adanya *stigma* buruk atas segala sesuatu yang berbau Orde Baru. Sedangkan penggunaan kalimat *maka saya khawatir jangan-jangan rakyat malah tidak menerima* seolah menunjukkan suatu keadaan kalau Habibie tetap nekad maju

maka rakyat akan menolak dan melakukan demonstrasi secara besar-besaran. Sebab terminologi *rakyat* itu menunjuk pada kuantitas (jumlah) bukan kualitas. Kalau rakyat melakukan penolakan maka situasi negara akan menjadi kacau. Pernyataan yang demikian tidak berbeda dengan apa yang diintrodusir oleh Michael van Langenberg di atas, bahwa kalau terjadi kekacauan itu sebagai akibat logis dari kekacauan Orde Baru, bukan disebabkan oleh munculnya keadaan baru (gerakan reformasi).

*Stereotipe* yang sama juga pernah dimunculkan dalam pernyataan H. Mohammad Zein, seorang anggota Panitia Pendaftaran Parpol Departemen Kehakiman berkaitan dengan terganjalnya keabsahan Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai badan hukum yang diumumkan di Berita RI (BNRI). Terganjalnya keabsahan PRD sebagai badan hukum dikarenakan partai ini masih menggunakan istilah-istilah yang dipakai oleh Orde Lama.

Secara administratif PRD sudah melengkapi semua persyaratan. Namun untuk mensahkan di BNRI masih tertunda. Salah satu ganjalan yang menurut saya adalah masih digunakannya istilah yang dipakai di zaman Orde Lama, misalnya Demokrasi Sosial, Kerakyatan dan Progresif Revolusioner, ini terkesan kekiri-kirian.....Padahal zamanya bukan seperti itu tadi, dan alangkah baiknya kalau memakai asas musyawarah sesuai Pancasila (Kompas, 24 Februari 1999).

Penggunaan kalimat *masih digunakannya istilah yang dipakai di zaman Orde Lama* memberikan suatu bentuk penekanan bahwa istilah tersebut selayaknya tidak digunakan. Hal ini menunjukkan suatu kenyataan betapa nalar politik sebagaimana yang digunakan rezim Orde Baru masih cukup berpengaruh pada era reformasi. Artinya, citra buruk Orde Lama kembali dikedepankan untuk melakukan penolakan atas identitas sebuah partai, semacam PRD, padahal

reproduksi bahasa yang demikian telah banyak digunakan untuk kepentingan penguatan kekuasaan Orde Baru. Dalam keadaan yang demikian maka tidak heran apabila mereka yang menyelami praktek politik yang berlangsung dalam sejarah sosial kita sebagai bangsa, akan memiliki kesan kuat bahwa 'getaran-getaran besar nafsu ideologis' yang dikonstruksikan Orde Baru lewat bahasa tidak sepenuhnya pudar.

Pilihan kalimat selalu berhubungan dengan keinginan pembuat pernyataan. Kalimat *alangkah baiknya kalau memakai asas musyawarah sesuai Pancasila* berhubungan erat dengan keinginan negara untuk tetap mempengaruhi masyarakat, khususnya PRD. Intervensi negara melalui bahasa harus diakui memang sarat dengan kepentingan-kepentingan ideologis negara, melalui alur logika yang hendak dibangun negara.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Kesalahan berpikir dalam berbagai pernyataan tokoh dan pengamat sosial politik dalam wacana politik nasional merupakan suatu bentuk kekeliruan mereka dalam memperlakukan masalah sosial. Perbedaan latarbelakang kepentingan politik dan ideologi telah mempengaruhi mereka dalam memberikan berbagai argumen tentang persoalan-persoalan sosial politik yang berkembang. Perbedaan tersebut kemudian ditangkap oleh media massa (pers) yang berkepentingan untuk menampilkannya sebagai berita yang layak untuk ditampilkan di hadapan publik. Tidak heran apabila dalam sebuah kasus yang sama, setiap media membuat pilihan *framing* yang berbeda, tergantung pada pilihan sikap politik dan ideologis yang dianutnya.

Framing yang digunakan Kompas misalnya, akan tampak berbeda dengan yang dipilih oleh Republika. Hal ini dikarenakan adanya paradigma ideologis yang berbeda yang mempengaruhi kedua media tersebut. Media massa pada era reformasi ini terdapat indikasi adanya pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi antar media.

Kesalahan pemikiran dalam memperlakukan masalah sosial di media massa (dalam konteks ini adalah Harian Kompas) banyak yang disebabkan oleh *pertama*, adanya kalimat yang *over-generalisation* yaitu penggunaan satu dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat *general* atau umum atau yang

kemudian disebut sebagai *Fallacy of Dramatic Instance*. *Kedua*, terdapat pernyataan yang mempunyai kesimpulan bahwa setiap masalah sosial yang sekarang terjadi sebagai sesuatu yang secara historis memang selalu ada, tidak bisa dihindari, dan merupakan akibat dari sejarah yang cukup panjang. Kesalahan berpikir ini dinamakan sebagai *Fallacy of Retrospective Determinism*. Misalnya, terjadinya konflik sosial yang banyak melanda di negeri ini dikatakan sebagai sesuatu yang wajar terjadi, karena membaca sejarah manusia adalah sejarah konflik. Model kesalahan yang *ketiga* adalah adanya *Post Hoc Ergo Propter Hoc* yaitu anggapan bahwa apabila ada peristiwa yang terjadi dalam urutan temporal, maka selalu dikatakan bahwa yang pertama adalah sebab dari yang kedua.

Dalam peristiwa konflik sosial di Sambas misalnya, terlihat jelas terjadinya kesalahan berpikir semacam ini. Kalau diperhatikan, dalam peristiwa tersebut masyarakat Madura seolah menjadi 'terdakwa' dan selalu dalam posisi yang salah; misalnya terminologi *sebagai pendatang, berbuat seenaknya, selalu membawa celurit*, dan sebagainya. Terdapat berbagai pernyataan yang menyudutkan masyarakat Madura. Tampaknya, dalam terminologi ini, masyarakat sudah terlanjur menyepakati adanya citra buruk atas perilaku masyarakat Madura; dengan caroknya.

Analisis wacana atas berbagai pernyataan tokoh dan pengamat juga ditemukan adanya jalinan yang erat antara reproduksi bahasa dengan kepentingan politik kekuasaan. Reproduksi bahasa terutama dilakukan oleh negara (*state*) untuk menciptakan citra buruk atas berbagai gerakan atau kelompok sosial politik

yang berbeda dengan nalar negara. Bahkan para tokoh politik juga melakukan hal yang sama, sebagaimana negara, untuk membuat reproduksi wacana terhadap sesuatu yang berlawanan dengan logika mereka, misalnya dengan memberikan *stigma* atas Orde Baru atau *kadernya* Soeharto terhadap orang-orang yang pernah berada pada kekuasaan rezim Orde Baru.

Realitas memberikan suatu bukti kuat bahwa model-model reproduksi bahasa selalu digunakan dalam setiap pertarungan politik memperebutkan kekuasaan, sebagaimana pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru. Meskipun reproduksi bahasa tidak disebutkan secara *eksplisit*, tetapi substansinya tetap sama berusaha untuk memberikan *stereotype* atas lawan politiknya. Bahkan terdapat pernyataan yang secara *implisit* bermakna merendahkan lawan politik dan mengunggulkan dirinya atau kelompoknya dalam pertarungan politik kekuasaan memperebutkan kursi kepresidenan.

Dengan demikian, pilihan kalimat yang dipergunakan untuk mereproduksi bahasa dan juga wacana sesungguhnya sarat dengan kepentingan politik dari masing-masing kekuatan dan tokoh politik. Setiap kalimat mengisyaratkan adanya kesimpulan yang tersembunyi dari arah dan maksud yang hendak dituju serta terdapat target yang hendak diraih. Hal ini tampak pada berbagai pernyataan di sekitar rebutan pengaruh dalam wacana rebutan kursi kepresidenan. Banyak tokoh yang mudah membuat argumen tentang persyaratan calon presiden untuk membela kepentingan politiknya, tetapi dengan cara melemahkan kelompok lain.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Dari berbagai bentuk kesalahan berpikir di atas, maka hendaknya perlu diperhatikan secara kritis maksud-maksud pernyataan yang muncul di media massa, agar tidak terjebak untuk mudah mengambil kesimpulan atas setiap pernyataan yang belum tentu kebenarannya.
2. Perbedaan *framing* secara mendasar membuktikan bahwa media massa tidak independen, oleh karena itu hendaknya masyarakat secara kritis dan selektif pula dalam menentukan pilihan untuk membacanya.
3. Jangan mudah menganggap benar setiap pernyataan di setiap media massa, karena bisa jadi terjadi bias media massa atau juga terjadi maksud-maksud tersembunyi dalam setiap pernyataan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. 2000. *Kekuasaan Otoriter, Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni, Studi Atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*, Yogyakarta: Insist
- \_\_\_\_\_. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS
- Foucault, Michel. 1972. *The Archeology of Knowledge and the Discourse on Language*. New York: Pantheon Books
- Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim, ed. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan
- Nugroho, Bimo, Eriyanto dan Frans Surdiasis. 1999. *Politik Media Mengemus Berita*. Jakarta: ISAI
- Rakhmat, Jalaluddin. 1999. *Rekayasa Sosial, Reformasi, Revolusi atau Manusia Besar*. Bandung: PT. Rosdakarya
- Ruwiastuti, Maria R.. 2000. "Sesat Pikir" *Politik Hukum Agraria, Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat*. Yogyakarta: Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar
- Small, William J. 1972. *Political Power and The Press*. New York: W.W. Norton & Co.
- Sobur, Alex, 2001. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Rosdakarya
- Sudibyo, Agus, 1999. *Citra Bung Karno, Analisis Berita Pers Orde Baru*. Yogyakarta: Bigraf Publishing
- Sumaryono, E. 1999. *Dasar-Dasar Logika*. Yogyakarta: Kanisius
- Sukadidjo, R. 1998 *Logika Dasar*. Jakarta: Gramedia
- Winarko, Heri. 2000. *Mendeteksi Bias Berita: Panduan untuk Pemula*. Yogyakarta: KLiK

# LAMPIRAN

# Soal Pengunduran Diri H.M. Soeharto Pakar Tata Negara: Sah dan Konstitusional

JAKARTA — Pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya, yang dilanjutkan dengan pengangkatan Wapres Habibie sebagai presiden masih menjadi perdebatan di antara pakar hukum

Pengunduran diri Pak Harto, kemarin, menggunakan Pasal 8 UUD 1945 dan Ketetapan MPR VII/MPR/1973. "Dari sudut pandang hukum tata negara kita, pengunduran diri itu sah dan konstitusional," kata pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra. Pandangan senada juga diungkapkan oleh Prof Dr Sri Soemantri.

Soemantri, yang sering menjadi promotor atau penguji utama calon doktor hukum tata negara, menilai dua ketentuan hukum telah dipenuhi, yakni Pasal 8

UUD 1945 dan Ketetapan VII/MPR/1973. "Dengan pernyataan Pak Harto berhenti dari jabatannya, maka berdasarkan dua ketentuan hukum tersebut, wapres memang otomatis menjadi presiden."

Pendapat senada dilontarkan Satya Anianto, Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara FH-UI. "Pengunduran diri Soeharto dan pengangkatan Habibie sebagai presiden, sah secara konstitusional," ujar Satya.

Pasal 8 UUD 1945: *Bila presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya.* Sedangkan Pasal 1 Ayat (2) TAP VII/MPR/1973, *Yang dimaksud berhalangan tetap adalah mangkat, berhenti*

*atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam nusa jabatan. Pasal 2 Ayat (1) Dalam hal presiden berhalangan tetap, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya.*

Dengan merujuk dua ketentuan tadi, Wakil Ketua DPR Syarwan Hamid menyatakan bahwa pengunduran diri Pak Harto sah dan konstitusional. Pendapat sama disampaikan Ketua Umum DPP PPP Ismail Hasan Metareum.

Metareum yang Wakil Ketua DPR-MPR, pernah menjabat sebagai Dekan FH Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Namun Ketua Dewan Pengurus YLBHI Bambang Widjoyanto kurang

Bersambung ke Hlm. 4

## SOAL PENGUNDURAN

sependapat. Pasal 8 UUD 1945, kata Bambang, hanya menjelaskan bahwa wakil presiden hanya bisa melaksanakan tugas presiden hingga masa jabatannya berakhir. Ia menyebut keputusan Pak Harto sepihak.

Prof Dr Dimiyati Hartono juga tidak sependapat. Ia menyatakan bahwa pengunduran diri atau penyerahan jabatan harus melalui mekanisme Sidang Umum Istisnawi. "Ini menyalahi konstitusi."

Yusri membenarkan bahwa tindakan Pak Harto bersifat sepihak, karena tidak mengajukan permohonan berhenti atau diminta pertanggungjawaban untuk berhenti.

"Beliau dalam pernyataan tadi yang dibacakan, jelas judul dari apa yang beliau bacakan itu adalah pernyataan pengunduran diri sebagai Presiden RI," ujarnya. Menurutnya, kalau membuat pernyataan berhenti, itu tidak perlu menunggu orang yang disampaikan pernyataan itu setuju atau tidak setuju.

Menurut penilaian Yusri, Pak Harto bukan memohon untuk berhenti atau memohon untuk meletakkan jabatan. Tapi Pak Harto membuat suatu pernyataan, *declare*, bahwa dengan ini saya menyatakan saya

berhenti. "Jadi tidak perlu ada penerimaan atau penolakan atau sidang dari MPR untuk ini, karena itu adalah pernyataan sepihak dan sah dilihat dari segi hukum tata negara," tegasnya.

Tentang pengucapan sumpah Presiden, memang akan mengundang perdebatan. Namun, baik Syurwan maupun Metareum memaklumi hal itu. Pasalnya, kemarin, dalam kondisi libur nasional DPR sendiri, kata Syurwan, tengah diduduki mahasiswa. "Walau hanya sedikit, tak boleh ada kevakuman kekuasaan."

Menurut Soemantri, ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UUD 1945 tak dapat dipakai karena gedung DPR/MPR diduduki para mahasiswa. Oleh karena itu, bisa dipergunakan Pasal 2 Ayat 3.

Namun, Arinanto kurang sependapat dengan Soemantri mengenai penerapan Ayat 3 ini. Ia menyatakan sumpah harus dilakukan di gedung DPR/MPR. "Oleh karena itu alasan tersebut belum dapat diterima," ujarnya.

Yusri sependapat dengan Soemantri. Pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara telah memenuhi ketentuan yang

dan Him 1

berlaku. "Karena keadaan yang sangat mendesak, sangat emergency, sehingga pengucapan sumpah Wakil Presiden menjadi Presiden itu, tidak dapat dilakukan di hadapan DPR," ujarnya.

Yusri juga menegaskan bahwa dunia mengetahui bahwa gedung DPR sejak Senin hingga Rabu malam diduduki oleh para demonstran. Akibatnya sangat sulit untuk mengumpulkan anggota dewan untuk melakukan sidang DPR.

"Untuk mencegah terjadinya kevakuman kekuasaan, maka dengan segera dilakukan penyempahan Wakil Presiden menjadi Presiden di hadapan Mahkamah Agung sesuai dengan ketetapan MPR Nomor 7/MPR/1973, di dalam Pasal 2 dan Pasal 4," tambah Yusri. Pengambilan sumpah tadi juga sesuai dengan UU No 15 Tahun 1985 tentang MA. "Ketua, wakil ketua, dan ketua-ketua muda itu adalah pimpinan MA, dan berhak serta berwenang untuk mengatasnamakan MA sebagai lembaga," ujarnya.

Apakah dengan tampilnya Habibie sebagai presiden berarti sekaligus penyerahan mandat? Menurut Soemantri memang ada dua pendapat mengenai hal itu. Pendapat pertama, dengan diangkatnya wapres sebagai presiden berarti ia diberi mandat oleh

MPR untuk melaksanakan GBHN.

Dengan demikian, tambahnya, kedudukan Habibie bukan hanya selaku presiden dan mandataris MPR tapi sekaligus sebagai kepala negara dan panglima tertinggi ABR. "Saya sendiri sudah sejak lama menyerjui pendapat pertama," kata Soemantri yang juga Rektor Universitas 17 Agustus ini. Pe dapat kedua, tidak otomatis presiden itu diberikan mandat oleh MPR.

Arinanto menambahkan, untuk pengu-kuhan Habibie selaku Presiden ke-3 RI, perlu digelar SI MPR. SI MPR ini, tambahnya, untuk mencabut TAP MPR No IV/1998 dan TAP MPR No VI/1998 tentang Pengangkatan Soeharto selaku Presiden dan Habibie selaku Wakil Presiden. "Kedua TAP ini harus dicabut," katanya.

Selain itu, tambahnya, SI MPR perlu dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban Pak Harto selama ia menjabat selaku presiden, misalnya, tentang cadangan devisa negara.

Pak Harto tetap harus membuat pertanggungjawaban, kendati ia sudah menyatakan berhenti. "Jangan presiden baru yang harus mempertanggungjawabkannya," cetus Arinanto.

■ bud/dan/vis/drm



## Dari Sisi Hukum Tata Negara Mundurinya Soeharto Timbulkan Pro-Kontra

Jakarta, Kompas

Keputusan Soeharto untuk berhenti sebagai Presiden RI 1998-2003 dan diangkatnya Wapres BJ Habibie sebagai Presiden, ditanggapi pro dan kontra oleh ahli hukum tata negara. Ahli hukum tata negara Universitas Indonesia, Prof Dr Harun Alrasiid memandang proses suksesi di Istana Merdeka itu konstitusional. Sedangkan ahli hukum Universitas Diponegoro Prof Dr Dimiyati Hartono berpendapat, langkah itu inkonstitusional.

Sementara Ketua Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR

Irsjad Sudiro, dan Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR Hamzah Haz sama-sama menganggapnya konstitusional.

Harun Alrasiid yang dihubungi Kompas, Kamis (21/5) di Jakarta, mengungkapkan, pelantikan BJ Habibie sebagai Presiden RI ketiga, sah dan tidak melanggar konstitusi ini sesuai pasal 8 UUD 1945, yang berbunyi apabila Presiden mungki berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wapres sampai habis waktunya.

"Prof. Harun akan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai

Presiden, dan diikuti pengucapan sumpah jabatan presiden oleh BJ Habibie di hadapan Mahkamah Agung. Itu adalah sah berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Justru kalau ada yang meminta Pak Harto mengabdikan mandat itu tidak ada, karena tidak diatur dalam konstitusi," jelasnya.

Sebaliknya Dimiyati Hartono menilai, pelantikan BJ Habibie tidak sah dan inkonstitusional. Karena merujuk pada pasal 9 UUD 1945 seperti yang diucapkan BJ Habibie sebelum memangguk tugasnya -- sumpah atau janji. Presiden itu harus diucapkan di hadapan MPR atau

DPR.

Soeharto menjadi Presiden RI 1998-2003 berdasarkan Tap No IV/MPR/1998, sedang BJ Habibie diangkat sebagai Wakil Presiden RI berdasarkan Tap No VI/MPR/1998. Hingga Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden RI, dan BJ Habibie diangkat sebagai Presiden, kedua Tap MPR itu belum pernah dicabut MPR.

Sementara ahli hukum Tata Negara lainnya, Dr Albert Hasibuan yang ditemui terpisah berharap, masyarakat menjadikan pelantikan Habibie sebagai Presiden di Istana Merdeka sebagai

suatu fakta sejarah, serta perlu mempersoalkan keahliannya. Karena persoalan masih bisa diperdebatkan.

**Tap VII/MPR,**

Dimiyati bersikukuh, bahwa BJ Habibie sebagai Wakil Presiden RI tidak sah. Karena pasal 9 UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wapres bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Hal

(Bersambung ke hlm 5 ke

## Mundurinya --

sampainya hadir pimpinan MPR/DPR, tetapi mereka bukan MPR atau DPR itu sendiri. Pimpinan MPR/DPR cuma alat perlengkapan Dewan dan tidak merepresentasikan DPR atau MPR.

Ia mengakui, memang ada Keputusan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Kradan Presiden dan/atau Wapres RI Perhalangan. Pada pasal 2 ayat 1 Tap itu menyatakan, *dalam hal Presiden berhalangan tetap, ia diganti oleh Wapres sampai habis masa jabatannya. Ayat 2 menyebutkan, Wapres sebelum memegang jabatan Presiden sebelumnya dimaksud pada ayat 1, beresumpah atau berjanji di hadapan DPR. Selanjutnya ayat 3, berbunyi apabila DPR untuk maksud tersebut pada ayat 2 pasal ini tak mungkin mengadakan rapat, Wapres sebelum memegang jabatan Presiden bersumpah atau berjanji di hadapan MA.*

Dimiyati pun menuturkan, Soeharto boleh-boleh saja mengundurkan diri atau berhenti sewaktu-waktu. Namun ia harus mengemukakan lebih dulu mandat yang diterimanya dari MPR, karena diangkat oleh MPR ini dikukuhkan dengan Keputusan MPR mengenai Pengangkatan Presiden, yang sampai hari ini belum pernah disebut.

"Kalau alasan penyempahan Habibie itu, karena DPR tidak mungkin bersidang, itu juga tidak sepenuhnya benar. Sekalipun Gedung MPR/DPR ini diduduki mahasiswa, tetapi Dewan dan bisa saja berfungsi. Bahkan, sidang Dewan itu yang dituntut untuk segera

(Sumbangan dari halaman 1)

Menurut Dimiyati, Istana Merdeka bukanlah gedung wakil rakyat. Bila hari Kamis (21/5) lalu DPR tak mungkin bersidang, namun

Soeharto ingin cepat berhenti sebagai Presiden, cukup menyatakannya dan menyerahkan tanggung jawab kepada Wapres. Pelantikan Wapres jadi pejabat Presiden bisa dilakukan pada waktu berikutnya, kalau situasi sudah memungkinkan.

"Ini 'kan tak akan menimbulkan kevakuman kekuasaan. Tetapi yang harus diingat, Presiden yang baru diangkat oleh MPR. Bukan diserahi mandat begitu saja oleh Presiden yang lama," imbuh Dimiyati lagi.

Dijelaskan, tindakan Soeharto berhenti dan segera menyerahkan tanggung jawab kepada Habibie merupakan pelecehan terhadap DPR. Padahal, sampai saat ini DPR masih tetap berdiri maupun menjalankan fungsinya. Bahkan, aksi mahasiswa proreformasi mengarah pada upaya menambatkan lembaga legislatif itu.

"Dengan kebijakan itu, Pak Harto telah menurunkan kredibilitas DPR. Kalau DPR menerima begitu saja langkah ini, itu berarti Dewan menurunkan harga dirinya. Itu juga akan menjadi tradisi tata negara yang kurang baik. Apalagi Gerakan dilakukan di Istana Merdeka, acara itu takkan tercatat dalam sejarah kediamatan rakyat yang diwakili MPR/DPR," tegasnya.

## Tidak disebut

Saat adanya kewajiban penyempahan mandat

gang Soeharto, Lajjat Harun Alrasid, sama sekali tidak disebut dan diatur dalam UUD 1945. "Jadi apa yang dilakukan Soeharto adalah sah dan sesuai dengan pasal 8 UUD 1945," urainya.

Harun menulit, selama ini 'olah terjadi salah kaprah mengenai istilah Mandataris MPR yang sudah berjalan sejak Prof Supomo ini harus diluruskan. "Saxi istilah mandataris tidak dikenal dalam UUD 1945, tetapi malah dijadikan pegangan di MPR. Lihat saja zaman di mana MPRS memberikan berbagai gelar kepada Soekarno. Istilah ini yang kemudian menjadi pegangan sampai saat ini," papar Harun.

Dijelaskannya, ada tiga kriteria pasal 8 UUD 1945 yang mengatur tidak berfungsinya lembaga Kepresidenan di mana kemudian wakil presiden akan naik menjadi presiden. Pertama, jika presiden mangkat, wafat atau meninggal dunia. Kedua, jika presiden berhenti, dan ketiga presiden tidak dapat melakukan kewajibannya. Selain ketiga kriteria itu, ada satu kriteria lagi yang diatur dalam Tap VII/MPR/1973. Di situ diatur adanya mekanisme pertanggungjawaban dari presiden jika tidak melaksanakan amanat UUD 1945 dan GBHN.

Jadi, menurut Harun, soal pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Soeharto menjadi tidak tepat karena memang tidak diatur dalam UUD 1945. "Ini karena Soeharto sebagai presiden memilih cara kedua, yaitu berhenti sebagaimana diatur pasal 8 UUD 1945," ucap Harun.

pengawasan sebagai tokoh yang dapat dimutakan Soeharto selama menjabat sebagai presiden, mahaguru hukum negara ini melihat sulit diralisir. "Saat ini Soeharto sudah menjadi rakyat biasa. Tanggung jawab Soekarto sudah diambil alih oleh Habibie," kata Harun.

Ia beranggapan, tindakan pribadi tidak dapat dicampurkan dengan tindakan jabatan. "Jika tindakan jabatan tak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kalau Soeharto melakukan tindakan pribadi yang melanggar hukum di wilayah ini, baru ia bisa dimintai tanggung jawab," ujarnya.

## Hari libur

Ketua F-PP Hamzah Haz menyalakan, peristiwa penyerahan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden berdasar pasal 8 UUD 1945 itu terjadi begitu cepat dan dilakukan pada hari libur la mengingatkan ketentuan pasal 2 Tap MPR No VII/MPR/1973.

Rumusan pasal tersebut pada ayat (1), *Dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Ayat (2), Wakil Presiden sebelum memegang jabatan Presiden sebelumnya dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bersumpah atau berjanji di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (3), Apabila Dewan Perwakilan Rakyat untuk maksud tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak mungkin mengadakan rapat, maka Wakil Presiden sebelum memegang jabatan Presiden bersumpah atau berjanji di hadapan Mahkamah Agung. (baw/ra/ru)*

## SOEHARTO AMBIL PUTUSAN SEPIHAK

KITA sulit menduga bagaimana isi hati dan perasaan Pak Harto saat-saat terakhir akan meletakkan jabatan yang dipegangnya selama 32 tahun. Kamis pagi pukul 09.08 kemarin. Yang bisa kita lihat, pria berusia 77 tahun itu tetap berdiri tegak, dengan suara yang jelas dan berirama datar, mengumumkan sendiri pernyataan berhenti dari jabatannya.

Menurut Prof Dr Yusril Ihsa Mahendra yang di hari-hari belakangan ini sering keluar masuk Istana, pernyataan Pak Harto berhenti dari jabatan presiden itu merupakan keputusan sepihak, sah, konstitusional, karena itu tidak memerlukan persetujuan dari siapa pun termasuk DPR. Pak Harto menyulukan berhenti, bukan memohon berhenti, katanya.

Pak Harto pun tersenyum ketika menyalami penggantinya BJ Habibie. Juga ketika menyalami para ketua Mahkamah Agung yang menyaksikan pembacaan sunnah jabatan presiden baru itu. Pak Harto lantas mengangkat tangan ke arah wartawan. Pak Harto dan putri sulungnya Ny Siti Hardiyanti Rukmana juga tersenyum ketika akan naik mobil pribadi, meninggalkan Istana Negara menuju kediaman Jalan Cendana.

Tapi tidak tersenyum bagi yang menyaksikan detik-detik dibacakannya pernyataan berhenti itu, baik yang menonton lewat TV maupun yang melihatnya langsung di Istana Negara. Baik bagi yang selama ini dekat dengannya maupun yang selama ini tidak dekat dengannya. Untuk sesaat semini itu, semuanya diam dengan

*(Berambung ke halaman 5 kolom 1)*

Turun

perasaannya masing-masing.

BJ Habibie yang menggantikan-nya dengan proses pengangkatan yang simple dan sederhana tak bisa menyembunyikan ketegangannya. Namun saat mengucapkan sumpah jabatan, dia berhasil menata nafas dan irama suaranya. Para Ketua Mahkamah Agung yang disalami Pak Harto sesuai pengambilan sumpah jabatan Presiden baru itu juga kelihatan tegang dan haru.

Keputusan Pak Harto berhenti dari jabatan presiden itu memang terasa amat cepat. Dua hari sebelumnya, setelah bertemu dengan sembilan tokoh masyarakat, dia masih berpendirian akan terus memegang jabatan presiden dan memimpin reformasi yang dituntut masyarakat. Dia masih berpendirian tidak meletakkan jabatan, tapi "hanya" akan mereshuffle kabinet, dan membentuk Komite Reformasi.

Rabu, sehari sebelum melatakan jabatan, pemerintahan Presiden Soeharto masih mengumumkan bahwa Kamis kemarin namanya anggota Komite Reformasi akan diumumkan.

Itu berarti, keputusan untuk berhenti dari jabatan presiden "diproses" amat cepat hanya beberapa jam saja. Tepatnya pada sekitar Rabu sore hingga malam harinya. Pada saat itu, di gedung DPR/MPR Senayan ratusan ribu massa sebagai besar mahasiswa berkumpul dan terus menuntut reformasi dilakukan secepatnya. Para pimpinan dan anggota dewan juga mengambil sikap yang sama.

Kita belum tahu, bagaimana persisnya keputusan berhenti itu diambil. Apakah karena sejumlah orang melakukan desakan langsung di hadapan Pak Harto, atau Pak Harto sendiri yang mengambil prakarsa setelah dengan cermat mengikuti perkembangan terakhir.

Kita juga belum tahu bagaimana persisnya proses keputusan langsung menjadikan Habibie sebagai pengganti Pak Harto itu berlangsung. Kita tentu tidak mempermasalahakan legalitas naiknya Wapres menjadi Presiden karena memang ada konstitusi yang mengatur.

Yang kita tidak tahu ialah, apa-

kah pengangkatan langsung Habibie itu diputuskan setelah mendengar pertimbangan dewan dan lembaga serta komponen lain yang memiliki kredibilitas baik, yang dikemudian hari bisa diharapkan memberikan dukungan pada presiden yang baru itu.

Jika disimak dari penjelasan yang disampaikan Pak Harto pada saat menyatakan berhenti keputusan langsung mengangkat Habibie itu tampak lebih didominasi oleh prakarsa Pak Harto sendiri setelah melewati proses pertimbangan yang masak dan pelik.

Siapa pun yang memberi masukan atau desakan ketika proses pengambil keputusan itu berlangsung, tampaknya kendali tetap di tangan Pak Harto. Ini tercermin dari keputusan politik yang otomatis menyertai pernyataan berhenti itu. Yakni tampilnya Habibie menjadi Presiden yang selama ini juga dikenal sebagai orang terdekat Pak Harto, dan kemudian langsung adanya jalinan dari Panglima ABRI terhadap keselamatan dan kehormatan mantan Presiden mandataris MPR, termasuk Pak Harto dan keluarganya.

Keputusan yang diambil Pak Harto tersebut dari sisi hukum ketatanegaraan dinilai banyak pihak telah memenuhi syarat legalitas dan formalitas konstitusi, khususnya pasal 8 UUD '45. Derbagai kalangan juga menyambut baik dan merasa lega dengan turun takhtanya Pak Harto.

Namun, ada sisi lain yang oleh sebagian kalangan dinilai memerlukan pencerahan khusus. Yakni, pola pergantian langsung ke Habibie tadi. Sekali lagi, bukan karena pergantian itu tidak memenuhi syarat konstitusional, tapi ada realitas politik masyarakat yang memperdebatkan pola pergantian itu. Pengamat politik Mochtar Pabounggi, misalnya menilai bahwa yang terjadi kemarin itu adalah pergantian figur kepemimpinan nasional, tapi belum menunjukkan pergantian rezimnya.

Amien Rais, salah satu tokoh simbol gerakan reformasi pun menyambut baik pernyataan berhenti Pak Harto. Namun demikian, dia juga tidak bisa secara serta merta langsung mendukung kepemimpinan Habibie. Amien menunggu

(Sambungan dari halaman 1)

sampai Habibie menunjukkan bukti berupa sikap dan kebijaksanaan menjalankan reformasi sesuai dengan kehendak rakyat. Produk jangka pendek yang diharapkan segera terlihat ialah terbentuknya kabinet yang terpercaya dan bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), serta terselenggaranya pemilu yang benar-benar berlangsung demokratis dalam waktu enam bulan sampai satu tahun mendatang.

Ketua Fraksi terbesar DPR (FKP) Irsyad Sudiro juga mengatakan bahwa realitas politik di masyarakat harus tetap diperhatikan berkaitan dengan pergantian Presiden dari Pak Harto ke Habibie. Karena itu, pihaknya akan terus memantau perkembangan, dan membuka peluang-peluang keputusan politik yang sudah terjadi sekarang ini. Alternatifnya, bisa selesai seperti sekarang, bisa juga ada kemungkinan menggal Sidang Istimewa MPR yang akan ditentukan oleh interaksi riil politik yang berkembang. Itulah yang harus diperhitungkan Habibie. (Tim Merdeka/MG)

Merdeka

# 'Itu Mengarah Makar'

**YOGYAKARTA** — Pemetaan Barisan Nasional untuk mendukung gerakan massa mengulangi Presiden Habibie memancing reaksi berbagai kalangan. Tokoh-tokoh dari Amien Rais menilai niat kelompok Gerakan Reformasi se-awala yang didukung Barisan Nasional tak bisa dibuktikan. Menurut saya itu kelewat, ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjawab wartawan di Jakarta, kemarin. Amien menyatakan Habibie merupakan presiden yang konstitusional dan sudah memiliki agenda-agenda politik kelas seperti menyiapkan perundang-undangan politik dan pemilu. Jadi, menurut Amien, sebaiknya semua pihak mengikuti agenda tersebut sampai berlangsungnya pemilu mendatang. "Pelanggaran agenda tersebut merupakan pelanggaran hukum," tegas Amien.

Pemilihan semula dibenarkan Hartono Mardjono SH. Malah menurut Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) ini, rencana mengulangi pemerintahan yang sah itu sama saja dengan makar. "PBB kelas menengah, itu makar," katanya menentang. Itu makar, ujar Ketua Panitia Murni Hartono, mengulangi presiden dengan presidium atau komite rakyat inkonstitusional. Maka dengan tegas ia menyatakan pihaknya akan menentang langkah itu.

Seperi halnya Amien Rais dan Hartono Mardjono, pakar hukum tata

negara Prof Dr Bagir Manan juga menilai pemetaan Barisan Nasional tersebut menduduki upaya makar. "Kalau mereka sampai bergerak, itu sudah bisa diulang makar. Bisa ditentaskan sanksi," tegasnya pada Republikika di Bandung kemarin.

Bagir kemudian mengimbau kalangan kampus agar memandangi persoalan ini lebih jernih. Sepintas, kata Bagir, dukungan Barisan Nasional tersebut terlihat demokratis. "Padahal, jika damai, apa yang mereka sebut perjuangan demokratis itu hendak dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Jadi, jangan mau hanya dijadikan alat mereka," kata Bagir.

Komisaris Bagir Manan dipertegas Dr Indra Sumargo. Dalam wawancara ini di LIPi ini mengingatkan bakal terjadinya anarki. "Langkah Barisan Nasional menggulingkan Habibie akan menyebabkan pihak lain juga melakukan hal yang sama kepada Barisan Nasional," katanya. Karena itu Indra meminta ABRI berikap proaktif. Penggerakan massa dalam pemilu saja, lanjutnya, sudah berpotensi kelangkaan. "Apalagi bila targetnya jelas, ABRI harus mengamati tindakan hukum," ujar Indra.

Indra juga menilai sikap Barisan Nasional terlembah. "Saya tak yakin ada yang bisa menyelesaikan krisis dalam

waktu singkat," katanya. Ia membandingkan Soeharto dulu membenahi wacana krisis Orde Lama butuh waktu 3-4 tahun. "Padahal Habibie baru 3-4 bulan. Bangsa ini belum memiliki leca bakan," ujarnya.

Pemetaan Barisan Nasional tersebut terucut dalam Peremuan Potensi Gerakan Reformasi se-Jawa di Bandung yang berakir Kamis (1/10). Pertemuan Barisan Nasional tersebut juga diikuti oleh para pemimpin partai politik dan organisasi masyarakat lainnya. Mereka menentang aksi tersebut. "Kita sebagai mahasiswa dan intelektual harus mendukung pemerintah yang sah," ujar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Yogyakarta, Agus Setiawan. "Kita sebagai mahasiswa harus mendukung pemerintah yang sah," ujar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Yogyakarta, Agus Setiawan.

Adalah kelompok Barisan Nasional yang secara terbuka menyatakan akan mendukung rencana tersebut. "Aksi besar-besaran memang akan dilakukan kalau BJ Habibie beresolusi," kata Letjen (Pur) Kemal Idris. Meski demikian Kemal menyatakan tak ingin Barisan Nasional menjadi pemimpin gerakan. "Barisan Nasional hanya pendukung," katanya.

Adalah kelompok Barisan Nasional yang secara terbuka menyatakan akan mendukung rencana tersebut. "Aksi besar-besaran memang akan dilakukan kalau BJ Habibie beresolusi," kata Letjen (Pur) Kemal Idris. Meski demikian Kemal menyatakan tak ingin Barisan Nasional menjadi pemimpin gerakan. "Barisan Nasional hanya pendukung," katanya.

Adalah kelompok Barisan Nasional yang secara terbuka menyatakan akan mendukung rencana tersebut. "Aksi besar-besaran memang akan dilakukan kalau BJ Habibie beresolusi," kata Letjen (Pur) Kemal Idris. Meski demikian Kemal menyatakan tak ingin Barisan Nasional menjadi pemimpin gerakan. "Barisan Nasional hanya pendukung," katanya.

■ baw/af

# Amien Rais tak Setuju Ancaman Barisan Nasional

Jakarta, Kompas

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Amien Rais menyatakan tidak setuju cara-cara inkonstitusional, seperti gerakan massa yang didukung Barisan Nasional, untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

"Saya mengecam ancaman Barisan Nasional yang memberi waktu 40 hari untuk menggulingkan pemerintahan yang sah," kata Amien Rais dalam tablig akbar Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, Minggu (4/10).

Amien justru mempertanyakan tokoh-tokoh yang ada di dalam Barisan Nasional. "Saya sebagai anak bangsa melihat, bapak-bapak di Barisan Nasional ketika reformasi sedang digulirkan tak kelihatan batang hidungnya. Tiba-tiba mereka menjadi reformis untuk menjatuhkan pemerintahan Habibie," katanya.

Amien mengatakan, kepemimpinan Habibie hanya bersisa sementara sampai pelaksanaan Pemilu 1999 yang akan

menghasilkan pemerintahan yang sah, sehingga tidak perlu melakukan tindakan makar yang jelas-jelas inkonstitusional.

Ditegaskan, gerakan massa yang dipakai untuk menggulingkan pemerintahan yang sah akan mengundang anarkisme, karena ada kelompok lain yang siap menghadapi mereka.

Agar jadi panutan

Sementara Lembaga Penegak Kebenaran dan Keadilan (LPKK), dalam pernyataannya yang dikirimkan ke Kompas kemarin, menyatakan menyesalkan dukungan sementara tokoh BN, yang notabene para mantan perwira tinggi dan pejabat tinggi pemerintah, yang mendukung kegiatan inkonstitusional untuk

menjatuhkan pemerintah.

"Para muntan perwira tinggi dan pejabat tersebut nyata-nyata telah melanggar sumpah prajurit dan kehidupan bernegara yang berdasarkan konstitusi, serta sebaliknya mendorong munculnya perbuatan makar dan anarkis yang bertentangan dengan hukum dan sangat membahayakan negara," kata LPKK, dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua LPKK Laksda TNI (Purn) Adang Syaiful (mantan Panglima Komando Lintas Laut Militer) dan Sekretaris Usep Fathudin.

Setiap warga negara, demikian LPKK, terutama mantan pejabat dan perwira tinggi, sepatutnya menjadi contoh bagi hidup yang demokratis, toleran, dan tidak memaksakan kehendak.

LPKK mendesak pimpinan ABRI tidak ragu-ragu mengambil tindakan keras menghadapi gerakan makar, sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut LPKK, gerakan yang sengaja merencanakan menjatuhkan pe-

merintahan yang sah adalah gerakan makar, bertentangan dengan hukum dan semangat reformasi. Karenanya harus dilawan oleh semua kekuatan bangsa.

Sedang Partai Kesatuan Umat Indonesia (PKUI) yang dipimpin Zakiruddin Jamin menyatakan siap mengerahkan massa untuk menghadang aksi yang didukung BN. "Mereka (BN) itu tak lebih dari barisan sakit hati," kata Zakiruddin, seperti dikutip Antara, dalam rapat khusus membahas rencana BN tersebut.

Dikatakan, hukum harus ditegakkan dan tidak bisa seseorang atau kelompok mana pun melakukan aksi yang melanggar ketentuan hukum. "Kami ini mendukung kepemimpinan Habibie. Walaupun pemerintah saat ini belum mampu mengatasi krisis, itu wajar, karena baru berjalan beberapa bulan. Pak Harto, saat awal memimpin dahulu menggantikan Pak Karno bertahun-tahun tak mendapat bantuan luar negeri," katanya (Ant/Vik)

# "Menentang Habibie, Jangan Diartikan Makar"

Jakarta, Senin, Merdeka

"Menentang kebijakan Presiden BJ Habibie jangan lalu diartikan makar, kecuali kalau yang ditentang itu ideologi negara, dasar negara atau bentuk negara. Jadi, jangan menganggap perbedaan pendapat itu makar." Demikian penegasan salah seorang tokoh Barisan Nasional (Barnas) Letjen Purno Bambang Triantoro kepada *Merdeka* di Jakarta, tadi malam.

"Kalau itu cara berpikirnya ya tidak ada posisi *dong* namanya. Saya *nggak* ngerti kok tokoh-tokoh Barisan Nasional tiba-tiba takut akan mengerahkan massa. Massa itu apa? Barisan Nasional *kan* hanya gerakan moral, kita itu hanya eksponen-eksponen yang tak punya massa, jadi mana mungkin melakukan makar?" tegasnya. "Jadi Barisan Nasional itu tidak akan makar, karena tidak punya massa."

Dijelaskan, pertemuan di Bandung, Jumat

lalu adalah rapat koordinasi para mahasiswa se-Jawa dan kebetulan di forum itu hadir tokoh-tokoh Barisan Nasional. Kalau sekarang ada anggapan bakal ada massa yang digerakkan Barisan Nasional, itu udak masuk akal. Itu tuduhan yang berlebihan.

Menjawab pertanyaan, Bambang malah balik bertanya, apakah para mahasiswa mau disuruh-suruh orang-orang tua? Bambang juga tidak tahu apakah isu Barisan Nasional akan kumpulkan massa untuk makar sebagai upaya yang sengaja dilempar untuk mematahkan gerakan menentang kebijaksanaan Presiden BJ Habibie?

"Saya tegaskan lagi, makar itu hanya kepada negara, bukan kepada pemerintah. Saya *nggak* ngerti Menkeh Muladi 'menekan' mahasiswa dengan pasal-pasal KUHP," ujarnya.

Ditanya tentang ajakan Amien Rais untuk bertemu dengan Barisan Nasional, Bam-

bang mengatakan itu usulan yang bagus. Dia mengartikan, pernyataan tersebut sebagai ajakan untuk rekonsiliasi nasional dalam rangka menyatukan pendapat.

"Kalau Amien mau rekonsiliasi, mengapa tidak? Masalahnya siapa yang memprakarsai? Kalau Amien maunya begitu, ya silahkan undang. Mari berdiskusi dan berdialog," katanya.

Menjurus Anarkhi

Sebelumnya tokoh reformasi Amien Rais mengingatkan agar para jenderal yang berada di Barisan Nasional jangan melakukan langkah-langkah makar dengan cara mengerahkan massa untuk menjatuhkan Presiden Habibie. Amien yakin jika Barisan Nasional *ngotot*, maka kelompok bangsa lain yang jumlahnya besar akan mengerahkan massanya juga.

"Kalau dua kekuatan ini berhadapan, tentu akan menjurus kepada anarkhi-

Akhirnya bangsa ini akan kolaps," katanya di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Barisan Nasional menyatakan dukungan kepada gerakan massa yang meminta agar Presiden Habibie menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat. Hal itu tercetus dalam pertemuan Potensi Gerakan Reformasi se-Jawa di Bandung. Peserta pertemuan sepakat menggalang aksi massa selama 40 hari. Aksi rencananya dimulai hari ini (5/10).

Sementara itu, tadi malam di Kantor Barisan Nasional diadakan rapat tertutup yang dihadiri seluruh pengurus Barisan Nasional. Acaranya khusus membicarakan sinyal-sinyal orang atau kelompok lain yang mengatakan statemen Barisan Nasional menjurus makar. Hadir di sini Kemal Idris, Rachmat Witoelar, Prof. Dr. Dimiyati Hartono, Syaiful Sulun, Aric Sudewo, Roch Basuki dan lain-lain.

(Berlanjut ke halaman 6 kolom 1)

## Menentang ..... (Sambungan dari halaman 1)

Sekjen Barisan Nasional Rachmat Witoelar menyatakan bahwa rapat pengurus Barisan Nasional kali ini memang dikhususkan untuk mengkaji masalah statemen Barisan Nasional yang oleh sementara pihak ditafsirkan sebagai dukungan bagi sebuah gerakan anarkhi.

"Kami merasa perlu meluruskan duduk persoalan yang sebenarnya. Agar Amien Rais atau pihak-pihak lainnya tidak salah paham. Barisan Nasional sama sekali menolak makar dan tidak suka anarkhi," tegasnya.

Menurutnya, pertemuan di Bandung yang dihadiri Kemal Idris itu bukan pertemuan yang diselenggarakan Barisan Nasional. Dalam pertemuan itu, Kemal Idris tidak menandatangani maklumat apapun apalagi yang berisi dukungan bagi sebuah gerakan makar. "Perlu pula diketahui bahwa alam pikiran Pak Kemal tidak anarkhis," ujarnya.

Ditanya apakah sikap Barisan Nasional ini lahir karena adanya ancaman atau teror dari pihak atau kelompok lain, Rachmat menyatakan tidak ada yang memaksa

atau menteror Barisan Nasional. "Apa yang dikatakan ini sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Barisan Nasional tidak mendukung aksi gerakan massa yang menjurus makar," tegasnya.

**Awut-awutan**  
Selanjutnya menurut Amien Rais, yang kini menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, apa yang diinginkan oleh Barisan Nasional cukup jelas. Mereka ingin negara kita yang sudah *awut-awutan* ini tambah seram awut dengan mengandalkan kekuatan massa.

Amien juga mengkhawatirkan jika nafsu yang sangat besar untuk mengerahkan massa demi tujuan politik tertentu ini dibiarkan, maka nasib bangsa kita ke depan sudah bisa ditebak. "Kita akan seperti Yugoslavia," tegasnya.

Sebelum nasi itu menjadi bubur, lanjut Amien, dirinya merasa berkewajiban untuk mengingatkan Barisan Nasional. Dikatakan, jangan sekali-kali mengancam dengan aksi massa karena hal itu akan mendorong pihak-pihak yang haus kekuasaan berpikir untuk menggunakan aksi massa juga

Sebagai anak bangsa yang sudah sekian lama mendorong reformasi agar terus bergulir, dia menilai bahwa kehadiran para jenderal yang tergabung dalam Barisan Nasional agak terlambat. Dianggapnya, mereka muncul bagai pahlawan kesiangan.

"Sekarang mau macam-macam seolah-olah mereka itu wakil-wakil rakyat. Padahal ketika reformasi sedang hangat-hangatnya mereka malah tak pernah kelihatan batang hidungnya," katanya.

Sebenarnya, kata Amien, dirinya juga berprinsip bahwa pemerintahan Habibie ini adalah sambungan dari rezim Soeharto. "Habibie adalah sambungan dari rezim Soeharto. Itu jelas. Tetapi kita juga harus sadar bahwa inilah yang kita miliki sekarang," ujarnya.

Amien juga menyatakan pendapat jika masa tugas Habibie dibatasi untuk sementara saja, yaitu sampai Pemilu mendatang. Target dan tugas utama Habibie adalah berjuang sekuat-kuatnya mengendalikan harga sembako sambil menangkapi koruptor-koruptor kelas kakap yang telah

mengakibatkan krisis, termasuk koruptor yang telah menjungkir-balikkan harga. "Misalnya, koruptor beras seperti Kepala Dolog Jaya atau koruptor lain yang luar biasa jahatnya," katanya.

Dalam kesempatan ini, Amien kembali mengajak kepada para jenderal yang tergabung dalam Barisan Nasional untuk bertemu muka guna membicarakan langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil. "Mari kita bertemu. Terserah, apa mau saresehan atau rekonsiliasi nasional, saya akan ikut bergabung dengan tulus," ujarnya. (HPS/BY)

Merdeka, 5 Oktober 1998



## Relokasi Penduduk, Salah Satu Cara Tuntaskan Konflik Ambon

Jakarta, Kompas

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Suaidi Marasabessy mengusulkan untuk meredam dan menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi di Ambon dan sekitarnya, sebaiknya dilakukan relokasi penduduk di Ambon menjadi dua kelompok besar. Berdasarkan keadaan geografis Ambon yang terdiri dari dua jazirah, relokasi ini dimungkinkan untuk memisahkan kedua kelompok yang bertikai.

"Bila dalam enam bulan atau satu tahun mendatang konflik ini tidak dapat diselesaikan, kelompok penduduk Muslim dapat saja mendiami jazirah Leihitu, sementara kelompok Kristen di Jazirah Lattimur," ujar Marasabessy dalam dialog interaktif Solusi Kerusuhan Bernuansa SARA di Maluku yang dilaksanakan di Jakarta Selasa (7/12).

Selain Marasabessy, tampil pula Menteri Negara Hak Asasi Manusia (HAM) Hasballan M Saad, peneliti UI Dr Chusnul Maryah, sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola.

Menurut Marasabessy, secara tradisional masyarakat Ambon memang terpisahkan ke dua kelompok yang telah berada di kota-kota.

Ditekankan, konflik Ambon dan Kepulauan Maluku lainnya cenderung semakin meluas dari parah sejak akhir Juli hingga sekarang, jika dihindarkan dengan kerusuhan pada periode 19 Januari hingga akhir Juni 1999. "Periklanan di Ambon dan sekitarnya bukan lagi konflik antar suku, ras, dan golongan (SARA), tetapi sudah konflik antar umat beragama," tambah Marasabessy.

Menurut dia pada konflik Jilid I yang terjadi Januari sampai Juni, masih ada beberapa daerah embarkasi yang tetap aman, tetapi dalam konflik Jilid II, awal Juni hingga sekarang, daerah yang tadinya aman seperti daerah Mardika, Poka (lokal Universitas Pattimura), kompleks pertokoan, dan beberapa daerah lainnya menjadi kurang aman. "Kalau dulu WNI Cina tidak diganggu, kini mereka sudah eksodus ke Surabaya, Jakarta, dan luar negeri," kata-

nya.

Melihat permasalahan Ambon dan Maluku, Marasabessy menawarkan solusi berupa pendekatan agama dan kultural, mengidentifikasi permasalahan Ambon yang sebenarnya, menghilangkan konflik kepentingan, mempercepat pemberian bantuan, serta membuka lapangan kerja baru. Selain itu adalah menerapkan Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah, dan mengembalikan peran raja-raja, serta memperkuat penegakan hukum.

Mantan Panglima Kodam VII Wibrabuana yang membawahi daerah Maluku ini juga mengakui bahwa peran intelijen lemah dalam mendeteksi terjadinya pertikaian di Ambon dan Maluku, dan hal tersebut dirasakan dalam pertikaian Ambon.

### Manajemen konflik

Sementara itu, Chusnul Maryah mengatakan, sebenarnya konflik merupakan hal wajar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengatur konflik tersebut agar menjadi konflik yang konstruktif dengan mencari akar permasalahannya, serta bagaimana meminimalkan konflik yang bermuatan kekerasan.

"Ada tiga macam pendekatan untuk meredam konflik, dengan pendekatan kekuasaan, hukum dan kepentingan. Sayangnya pendekatan yang sering dipakai adalah kekuasaan, sedangkan pendekatan hukum sudah tidak dapat lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," tuturnya.

Dalam kasus Ambon, tampaknya pendekatan kekuasaan belum banyak dilakukan. "Setidaknya dimulai dengan mengidentifikasi siapa yang berkonflik di sana, lalu menyaring isu-isu yang ada dengan mengadakan kontrol terhadap rumors serta mengerti siapa sesungguhnya yang mendapat keuntungan dari konflik tersebut," kata Chusnul. Setelah itu, diharapkan ada konsensus yang disetujui bersama oleh pihak-pihak yang bertikai. (Joe)

# Warga Pendatang Terkurung di Ampalit

Palangkaraya, Kompas

Meski bantuan tambahan satu Satuan Stingkat Kompi (SSK) personel dari Mabes Polri sudah tiba di lokasi kerusuhan Ampalit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalteng) situasi keamanan masih belum normal. Bahkan sekarang, 1.000 warga pendatang terkurung di hutan, dan sangat mendambakan evakuasi secepatnya. Sedangkan yang sudah dievakuasi baru 600 jiwa.

Pemantauan dan keterangan Kepala Dusun Ampalit Cornelis kepada *Kompas*, Selasa (19/12), di Ampalit, massa menggunakan ikat kepala kain warna merah, makin bertambah. Sedikitnya 10.000 orang menguasai ruas jalan Bukit Batu hingga Pundu melakukan *sweeping* terhadap pengguna jalan tersebut.

Menurut Cornelis, kondisi 1.000 warga yang terkurung itu memprihatinkan. Mereka tidak berani keluar bebas di tempat umum. Padahal stok bahan kebutuhan hidup makin menipis.

"Saya tidak berpihak terhadap mereka yang terkurung itu, tetapi semata-mata rasa kemanusiaan agar aparat segera melakukan evakuasi. Jika tidak, permasalahan di Ampalit sulit diselesaikan," katanya.

Selama ini, kata Cornelis, armada yang menangani pengungsian dari Ampalit sangat terbatas, sehingga proses evakuasi

warga yang terkurung tersebut menjadi tidak lancar. Lambatnya evakuasi itu, dikawatirkan menyulitkan proses penyelesaian konflik.

"Apalagi sekarang ini massa di Ampalit sudah banyak pendatang, sehingga perlakuan belum diketahui secara rinci," ujarnya.

Pemantauan *Kompas* di Pelabuhan Kerengun Bangkirai, Palangkaraya, sedikitnya tiga kapal kayu diisi pengungsi asal Ampalit. Mereka diangkut menggunakan tujuh unit truk dari Ampalit dengan pengawasan ketat aparat keamanan.

## Berita bohong

Menurut Cornelis, sekarang ini muncul berita yang menyebutkan hasil *sweeping* aparat kepolisian menyita 30 bom melotot dari kawasan Ampalit. Padahal, aparat samasekali tidak menemui bom melotot dari

Ampalit. Sekadar tahu saja, di Ampalit sebagian besar warga di malam hari selalu menggunakan obor dari botol menggunakan minyak tanah karena belum terlayani aliran listrik.

"Bohong, kalau ada berita penyitaan bom melotot, apalagi dikatakan milik Suku Dayak. Bom melotot jangan disamakan dengan obor yang digunakan masyarakat sehari-hari," ujarnya.

Tokoh Suku Dayak kharismatik Tiel Jelau (saudara kandung gubernur pertama dan pahlawan nasional almarhum Tjilik Riwut) kepada *Kompas* minta seluruh senjata tajam yang disita petugas dari massa di sepanjang Kasongan-Pundu, segera dikembalikan kepada pemiliknya.

"Masalahnya, kata Tiel, mandau (senjata khas Suku Dayak), tombak, dan sumpit merupakan senjata yang memiliki arti tersendiri dan merupakan identitas Suku Dayak. "Saya sendiri yang menyampaikan kepada Danrem agar senjata yang disita segera dikembalikan. Kami sepakat kalau senjata disimpan di rumah. Kami berharap, upaya yang dilakukan jangan mempersulit keadaan," ujarnya.

## Suplai bahan pokok

Disisi lain, Tiel menjelaskan, peristiwa kerusuhan itu hendaknya segera dituntaskan. Akibat peristiwa itu, banyak merugikan warga Ampalit sendiri maupun

di Kasongan, ibu kota Kecamatan Katingan Hilir (30 kilometer arah timur Ampalit).

Kesulitan yang dirasakan, semua toko yang selama ini mensuplai bahan pokok masih tutup. Sedangkan untuk pergi ke Palangkaraya, dirasakan sulit selama kondisi masih mencekam.

"Kami warga Kasongan kesulitan mencari sayur-sayuran atau bahan makanan lainnya. Pemerintah harus mencari solusi terbaik mengenai penyediaan bahan pangan ini," ujar Tiel yang juga pejuang pendiri Kalteng.

Namun, yang paling penting dan mendasar, tidak benar bahwa kerusuhan di Ampalit merupakan tindakan Suku Dayak untuk mengusir pendatang. "Sekali lagi, tidak benar kalau kami mengusir pendatang. Kami hanya ingin menegakkan keadilan, bahwa tindak kriminal harus diproses secara hukum," ucap Tiel dengan nada meninggi.

Suasana mencekam juga dialami warga di Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalteng. Ruas jalan protokol dan tempat umum yang sehari-hari dipadati warga, kini mulai lengang. Bahkan di berbagai tempat, warga mulai bersiskamleng lengkap dengan senjata tajam.

"Paling tidak akibat kerusuhan di Ampalit, suasana Natal di Palangkaraya tahun ini terasa kurang maksimal," ujar Adiprin warga Bukit Raya. (nji)

# Baramuli: Hanya MPR yang Bisa Minta Saya Mundur

Jakarta, Kompas

Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) AA Baramuli menegaskan, hanya MPR hasil Pemilu 1999 yang dapat "memecat" dirinya dari posisi Ketua DPA. "Yang berhak meminta saya mundur adalah MPR hasil pemilu nanti. Tunggu saja MPR bersidang, MPR bisa mengajukan usul anggota-anggota DPA yang baru," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/1), usai mengikuti pidato pengantar RAPBN oleh Presiden BJ Habibie.

Baramuli menegaskan hal itu menanggapi pernyataan anggota DPA Prof Dr A Syafii Maarif yang mengatakan, sikap AA Baramuli tidak lagi mencerminkan sikap negarawan, dan lebih condong ke Golkar. Oleh karena itu, anggota DPA yang lain sepakat untuk membicarakan masalah itu dalam Sidang Pleno DPA tanggal 11-14 Januari 1999 di Jakarta.

Menanggapi hal itu, Baramuli menyatakan, siap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dalam Sidang Pleno DPA. Dikatakan, sebagai kader Golkar dia harus memperjuangkan keberadaan Golkar. "Dan itu tidak ada masalah dengan posisi saya sebagai Ketua DPA. Menteri-menteri pun banyak yang jadi pengurus

partai. Sistem demokrasi kita membolehkan hal itu," ungkapnya.

Dikatakan, sikap yang diambilnya saat ini adalah cara yang dipilihnya dalam berpolitik. "Itu cara saya. Itu pendirian saya terhadap reformasi. Cara lain tidak cocok dilakukan saya. Saya punya hak untuk menentukan, bagaimana cara saya berjuang, bukan orang lain," ujar Baramuli.

Baramuli justru mempertanyakan latar belakang munculnya perdebatan yang mempersoalkan keberadaannya di jajaran pimpinan Golkar dan posisinya sebagai Ketua DPA. "Kerakar. Dan itu tidak ada masalah dengan posisi saya sebagai Ketua DPA. Menteri-menteri pun banyak yang jadi pengurus

saja dengan saya," katanya. Menjawab pernyataan wartawan bahwa posisi Syafii Maarif berbeda dengan dirinya, sebab Muhammadiyah adalah ormas, bukan parpol, Baramuli mengatakan, "Sama saja. Tidak ada soal apakah itu ormas atau orsospol."

Sementara itu, Wakil Ketua DPA Achmad Tirtosudiro menyatakan, soal penggantian Ketua DPA masih akan dibicarakan lebih lanjut. "Saya akan bicara dulu dengan kolega-kolega saya," katanya.

Ulukul bahwa sepanjangan sejarah belum pernah terjadi pergantian Ketua DPA di tengah periode masa bakti. "Karena itu tidak akan bicarakan dulu kalau ada kejadian itu, bagaimana prosedur dan tata caranya," tutur Ahmad Tirtosudiro.

Menjawab pertanyaan, meski belum pernah terjadi dalam sejarah DPA, apakah ada peluang mengganti Ketua DPA sebelum usul masa baktinya, Ahmad mengatakan, "Bisa saja, tetapi kita bicarakan dulu."

Tidak etis. Sementara itu pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Prof Dr Bagir Manan SH

secara terpisah berpendapat sebagai lembaga yang bertugas memberi nasihat kepada presiden, tidak etis bila DPA dipimpin oleh seorang yang juga merangkap jabatan pada partai politik. Sebab, dikhawatirkan pikiran dan ucapannya tidak obyektif lagi, sehingga menimbulkan polemik baru di tengah ramainya permainan elite politik.

Dikatakan, secara hukum ketatanegaraan, memang belum ada peraturan tentang tidak bolehnya seorang ketua dan anggota DPA merangkap jabatan di parpol. Akan tetapi, secara moral dan etika, anggota dan ketua DPA seharusnya bebas dari kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu. "Untuk menegakkan moralitas pejabat, tidak semua aturannya harus bersandar pada hukum ketatanegaraan. Tetapi, lebih disandarkan pada etika, sebab negara ini dibangun atas landasan etika," katanya.

"Demi obyektivitas dalam memberikan masukan kepada presiden, sebaiknya mereka konsentrasi sebagai penasihat yang agung, sesuai dengan nama lembaganya," ujar Bagir. (Tim Kompas)

KOMPAS, RABU, 6 JANUARI 1999

## Fraksi ABRI di DPR tidak Wakili Kepentingan Politik

Jakarta, Kompas

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Letjen TNI Agum Gumelar mengutarakan, keberadaan Fraksi ABRI di DPR mendatang tetap akan berada pada posisi netral. Selain tidak akan mewakili kepentingan politik partai atau golongan mana pun, keberadaan fraksi ini akan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat, negara, dan bangsa untuk pembangunan ke depan sesuai dengan cita-cita nasional.

"DPR mendatang akan di/si oleh era multipartai. ABRI sebagai salah satu fraksi akan tetap menjaga netralitasnya, tidak memihak pada salah satu partai, tetapi akan memperjuangkan kepentingan negara di dalamnya," kata Agum menjawab Kompas di sela-sela acara Rapat Kerja Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab) dengan Komisi I DPR, Selasa (23/2).

Kepada Agum ditanyakan mengenai kursi ABRI yang berjumlah 38 buah, yang berarti ABRI memiliki satu fraksi di DPR yang cukup kuat untuk memperjuangkan kepentingan politiknya sendiri.

Menanggapi persoalan tersebut, Agum mengatakan, dalam paradigma baru ABRI, masyarakat tidak perlu mencurigai posisi ABRI dalam menjalankan fungsi sosial politiknya meskipun ada F-ABRI di DPR. "ABRI sebagai salah satu komponen sosial politik bangsa pasti tidak akan lagi memihak kepada kepentingan partai atau golongan tertentu seperti dulu. Yang akan

diperjuangkan F-ABRI di DPR adalah aspirasi masyarakat, bangsa, dan negara yang diyakini ABRI akan membawa bangsa ini ke arah pencapaian cita-citanya. Bukan kepentingan politik partai tertentu," paparnya.

Bukan retorika

Sedangkan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI menegaskan, komitmen netralitas ABRI dalam pemilu mendatang bukanlah sekadar retorika politik. "Netralitas ABRI ini akan dilaksanakan di lapangan oleh jajaran ABRI di tingkat paling atas hingga tingkat terendah. Netralitas ABRI ke depan tidak dapat ditawar lagi," katanya.

Menurut Wiranto, komitmen netralitas tersebut sejalan dengan empat paradigma baru ABRI tentang perannya dalam menyongsong abad-21. Netralitas ABRI tersebut harus dipahami secara utuh pemaknaannya, yaitu sebagai komitmen kebangsaan. "Bukan karena dipengaruhi oleh siapa pun dan paradigma ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada pengakuan dari ABRI tentang kesalahan di masa lalu yang perlu diperbaiki," tuturnya.

Wiranto juga mengatakan, ABRI memposisikan diri bukan sebagai alat kekuasaan maupun alat kepentingan politik, dan mengambil jarak yang sama serta membangun *role sharing* yang seimbang dengan segenap komponen bangsa dalam pembangunan nasional. (ama/gg)

KOMPAS, RABU, 24 FEBRUARI 1999